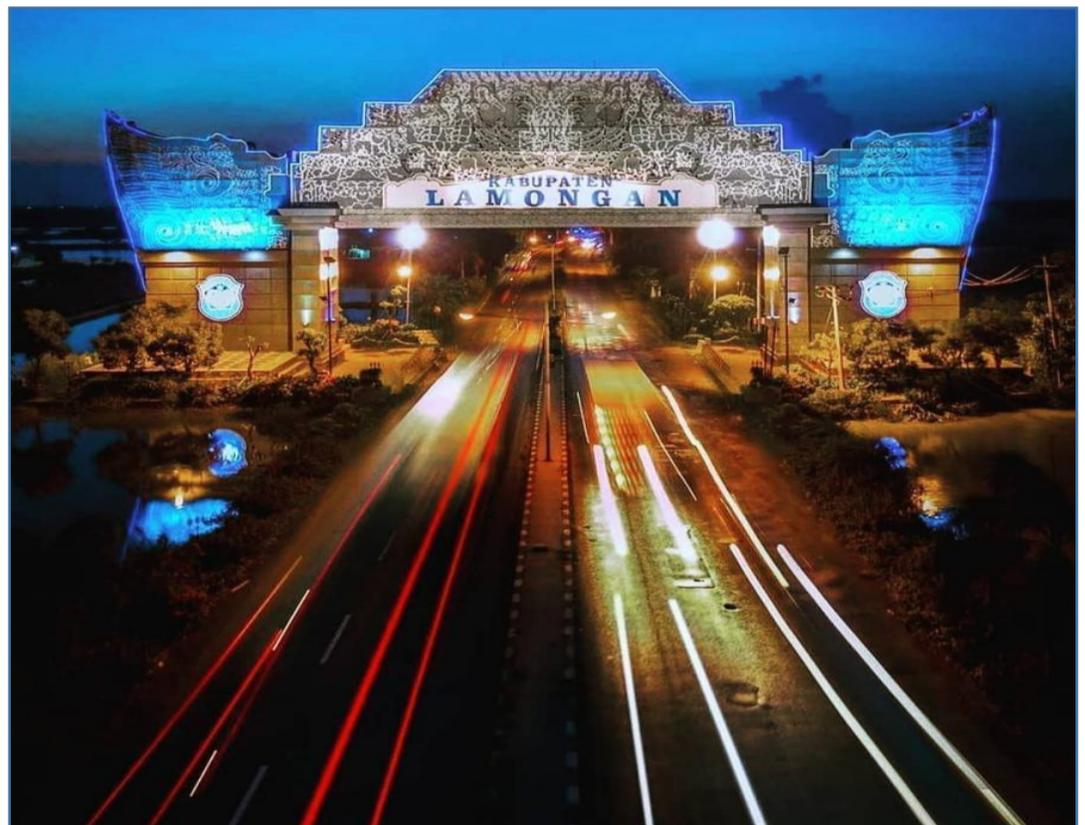




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN
-2023-

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga dapat tersusun Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, yang secara teknis mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) maka LPPD ini disusun dalam rangka melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan, yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah terdiri atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), selain substansi tersebut LPPD juga memuat laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Lamongan ini dibuat, untuk menjadi periksa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Maret 2023


BUPATI LAMONGAN
Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	11
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	56
BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DAERAH	63
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	63
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	63
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	64
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	64
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	64
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	64
BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN	89
1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	89
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	101
3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	108
3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN	108
3.1.1 Target Kinerja	108
3.1.2 Realisasi	115
3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN	142
3.2.1 Target Kinerja.....	142
3.2.2 Realisasi	146

3.3	PERMASALAHAN DAN KENDALA	159
3.4	SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	162

BAB IV : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

	MINIMAL	166
4.1	URUSAN PENDIDIKAN	166
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	166
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	168
4.1.3	Realisasi	169
4.1.4	Alokasi Anggaran	169
4.1.5	Realisasi Anggaran	170
4.1.6	Dukungan Personil	172
4.1.7	Permasalahan dan Solusi	173
4.2	URUSAN KESEHATAN	174
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	174
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	176
4.2.3	Realisasi	177
4.2.4	Alokasi Anggaran	178
4.2.5	Realisasi Anggaran	179
4.2.6	Dukungan Personil	181
4.2.7	Permasalahan dan Solusi	181
4.3	URUSAN PEKERJAAN UMUM	183
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	183
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	183
4.3.3	Realisasi	184
4.3.4	Alokasi Anggaran	184
4.3.5	Realisasi Anggaran	185
4.3.6	Dukungan Personil	186
4.3.7	Permasalahan dan Solusi	186
4.4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	187
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	187
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	188
4.4.3	Realisasi	189
4.4.4	Alokasi Anggaran	189

4.4.5	Realisasi Anggaran	190
4.4.6	Dukungan Personil	191
4.4.7	Permasalahan dan Solusi	191
4.5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	193
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	193
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	195
4.5.3	Realisasi	195
4.5.4	Alokasi Anggaran	196
4.5.5	Realisasi Anggaran	198
4.5.6	Dukungan Personil	199
4.5.7	Permasalahan dan Solusi	199
4.6	URUSAN SOSIAL	200
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	200
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	202
4.6.3	Realisasi	203
4.6.4	Alokasi Anggaran	203
4.6.5	Realisasi Anggaran	205
4.6.6	Dukungan Personil	208
4.6.7	Permasalahan dan Solusi	209
4.7	PROGRAM DAN KEGIATAN	210
BAB V : PENUTUP		223

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. PENJELASAN UMUM

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar Hukum Pembentukan Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Surat Menteri Dalam Negeri RI Tanggal 26 Januari 2022 Nomor. 120.04/926/OTDA Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 ;
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023;

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah $\pm 1.752,21 \text{ km}^2$ atau setara dengan 175.221 Ha atau $\pm 3.67\%$ dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Mempunyai panjang garis pantai sepanjang 47 km dan wilayah perairan laut seluas $902,4 \text{ km}^2$, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dengan rincian sebanyak 462 Desa dan 12 Kelurahan.

Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat $6^{\circ}51'54''$ - $7^{\circ}23'6''$ Lintang Selatan dan berada di antara $112^{\circ}4'41''$ - $112^{\circ}33'12''$ Bujur Timur. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi, Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

- Bagian Tengah-Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sari Irejo, Kembangbahu dan Sugio
- Bagian Selatan dan Utara merupakan daerah pegunungan kapur berbatuan dengan tingkat kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokoro.
- Bagian Tengah-Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah produktif namun rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

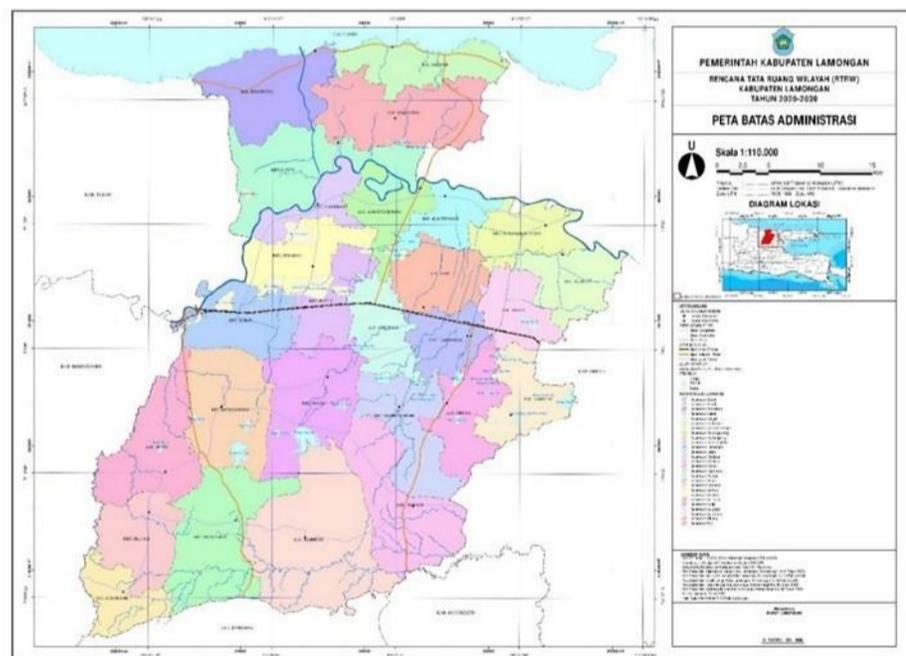
Topografi/ketinggian adalah kondisi ketinggian suatu wilayah dari atas permukaan laut yang dinyatakan dengan mdpl (meter di atas permukaan laut). Kondisi topografi Kabupaten Lamongan berkisar antara 0- 186 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Ngimbang yang terletak 186 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi menjadi 3 karakteristik daratan berdasarkan aliran sungai bengawan solo yaitu:

- Bagian tengah selatan merupakan dataran rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sari Irejo dan Kembangbahu.
- Bagian utara dan selatan yang merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
- Bagian tengah utara yang merupakan daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,45% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0 – 2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: baku sawah (PU) 44.08 Hektar, Baku sawah tidak resmi (Non PU) 8.168,56 Hektar, sawah tadah hujan 25.407,80 Hektar, Tegalan 32.844,33 Hektar, pemukiman 12.418,89 Hektar, Tambak / kolam / waduk 3.497,72 Hektar, kawasan hutan 32.224,00 Hektar, kebun Campuran 212,00 Hektar, Rawa 1.340,00 Hektar, Tanah tandus / kritis 889,00 Hektar dan lain-lain 15.092,51 Hektar.

Peta Wilayah Kabupaten Lamongan



c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan sampai dengan Semester II Tahun 2022 sebesar 1.380.145, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1	SUKORAME	10,780	10,768	21,548
2	BLULUK	11,390	11,692	23,082
3	MODO	25,521	25,487	51,008
4	NGIMBANG	24,798	24,598	49,396
5	BABAT	46,243	45,076	91,319
6	KEDUNGPRING	30,991	30,749	61,740
7	BRONDONG	39,503	38,552	78,055
8	LAREN	25,634	25,398	51,032
9	SEKARAN	22,497	22,009	44,506
10	MADURAN	17,082	17,133	34,215
11	SAMBENG	26,492	26,292	52,784
12	SUGIO	31,519	31,499	63,018
13	PUCUK	24,525	24,170	48,695
14	PACIRAN	50,274	49,174	99,448
15	SOLOKURO	24,860	24,695	49,555
16	MANTUP	23,280	23,480	46,760
17	SUKODADI	29,491	29,721	59,212
18	KARANGGENENG	22,125	22,124	44,249
19	KEMBANGBAHU	25,299	25,146	50,445
20	KALITENGAH	18,197	18,256	36,453
21	TURI	27,908	27,311	55,219
22	LAMONGAN	34,951	35,706	70,657
23	TIKUNG	23,465	23,670	47,135
24	KARANGBINANGUN	20,443	20,401	40,844
25	DEKET	22,059	21,979	44,038
26	GLAGAH	20,840	20,630	41,470
27	SARIREJO	12,611	12,920	25,531
TOTAL		692,778	688,636	1,381,414

Sumber : DKB Semester 2 Tahun 2022, DISDUKCAPIL Lamongan

d. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan

Wilayah Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 wilayah kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun
1	Sukorame	9	38
2	Bluluk	9	41

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun
3	Ngimbang	19	77
4	Sambeng	22	86
5	Mantup	15	72
6	Kembangbahu	18	77
7	Sugio	21	86
8	Kedungpring	23	74
9	Modo	17	76
10	Babat	23	47
11	Pucuk	17	34
12	Sukodadi	20	77
13	Lamongan	20	30
14	Tikung	13	68
15	Sarirejo	9	32
16	Deket	17	55
17	Glagah	29	87
18	Karangbinangun	21	71
19	Turi	19	53
20	Kalitengah	20	44
21	Karanggeneng	18	35
22	Sekaran	21	29
23	Maduran	17	31
24	Laren	20	38
25	Solokuro	10	20
26	Paciran	17	30
27	Brondong	10	23
Jumlah		474	1.431

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Tabel 1.3

Rekapitulasi Perangkat Daerah / Pegawai Pemerintah (PNS) di Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No	Unit Organisasi	Jumlah Pegawai ASN		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekretariat DAERAH	69	59	128
2	Sekretariat DPRD	15	5	20
3	Dinas Pendidikan	2,249	2,922	5,171

4	Dinas Perhubungan	45	7	52
5	Dinas Pemuda Dan Olahraga	22	9	31
6	Dinas Kesehatan	301	929	1,230
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	18	13	31
8	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	41	24	65
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	33	11	44
10	Dinas Perikanan	23	16	39
11	Dinas Sosial	13	13	26
12	Badan Pendapatan Daerah	26	13	39
13	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	13	13	26
14	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	23	14	37
15	Inspektorat	19	29	48
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	23	25	48
17	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15	5	20
18	Dinas Lingkungan Hidup	61	12	73
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	21	6	27
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10	9	19
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28	18	46
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	4	20
23	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	15	23	38
24	Sekretariat KPU	0	0	0
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	22	8	30
26	RSUD Ngimbang	40	53	93
27	RSUD Dr. Soegiri	137	254	391
28	Satuan Polisi Pamong Praja	53	2	55
29	Kecamatan Bluluk	12	4	16
30	Kecamatan Brondong	18	4	22
31	Kecamatan Deket	19	2	21
32	Kecamatan Kalitengah	12	3	15
33	Kecamatan Karangbinangun	16	2	18
34	Kecamatan Karanggeneng	12	6	18
35	Kecamatan Kedungpring	12	3	15
36	Kecamatan Kembangbahu	17	3	20
37	Kecamatan Babat	37	13	50
38	Kecamatan Lamongan	48	21	69
39	Kecamatan Laren	11	2	13
40	Kecamatan Maduran	13	2	15
41	Kecamatan Mantup	10	2	12
42	Kecamatan Modo	16	4	20
43	Kecamatan Ngimbang	12	2	14
44	Kecamatan Paciran	15	7	22
45	Kecamatan Pucuk	13	5	18
46	Kecamatan Sambeng	15	1	16
47	Kecamatan Sariarjo	15	2	17

48	Kecamatan Sekaran	11	5	16
49	Kecamatan Solokuro	8	1	9
50	Kecamatan Sugio	13	6	19
51	Kecamatan Sukodadi	9	3	12
52	Kecamatan Sukorame	14	2	16
53	Kecamatan Turi	14	3	17
54	Kecamatan Glagah	15	0	15
55	Kecamatan Tikung	13	3	16
56	Badan Penanaman Modal Dan Perijinan	0	0	0
57	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	24	17	41
58	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	29	15	44
59	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	18	14	32
60	Dinas Tenaga Kerja	19	12	31
61	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	134	88	222
62	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	24	14	38
63	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	54	4	58
64	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	13	25
65	RSUD Karangkembang	13	14	27
JUMLAH		4,098	4,798	8,896

Sumber Data : SIMPEG BKPSDM Kabupaten Lamongan per-Desember 2022

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tabel 1.4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nomor Urut	Uraian	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	523.035.537.324,00	508.978.414.422,83	(14.057.122.901,17)	97,31%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	147.391.000.000,00	154.083.648.100,00	6.692.648.100,00	104,54%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.701.873.200,00	23.542.842.847,89	2.840.969.647,89	113,72%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.855.892.314,00	17.199.695.333,86	(5.656.196.980,14)	75,25%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	332.086.771.810,00	314.152.228.141,08	(17.934.543.668,92)	94,60%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.523.879.436.317,00	2.377.556.427.010,00	(146.323.009.307,00)	94,20%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah	2.523.879.436.317,00	2.377.556.427.010,00	(146.323.009.307,00)	94,20%
1.2.1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.212.494.162.000,00	2.156.881.017.553,00	(55.613.144.447,00)	97,49%
1.2.1.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	311.385.274.317,00	220.675.409.457,00	(90.709.864.860,00)	70,87%

1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	16.665.029.891,00	46.731.103.023,00	30.066.073.132,00	280,41%
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.665.029.891,00	46.731.103.023,00	30.066.073.132,00	280,41%
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah Pendapatan	3.063.580.003.532,00	2.933.265.944.455,83	(130.314.059.076,17)	95,75%
2	BELANJA	2.135.951.996.148,00	2.008.464.047.403,87	(127.487.948.744,13)	94,03%
2.1	BELANJA OPERASIONAL				
2.1.1	Belanja Pegawai	973.878.132.196,00	942.838.850.247,00	(31.039.281.949,00)	96,81%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	901.541.510.952,00	812.982.270.888,23	(88.559.240.063,77)	90,18%
2.1.3	Belanja Bunga	4.000.000.000,00	1.798.705.622,06	(2.201.294.377,94)	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	241.315.333.000,00	236.901.638.146,58	(4.413.694.853,42)	98,17%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.217.020.000,00	13.942.582.500,00	(1.274.437.500,00)	91,62%
2.2.	BELANJA MODAL	528.798.716.530,00	492.502.248.778,20	(36.296.467.751,80)	93,14%
2.2.1	Belanja Tanah	49.480.500.000,00	42.354.601.601,00	(7.125.898.399,00)	0,00%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	143.524.210.105,00	133.859.921.691,00	(9.664.288.414,00)	93,27%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	87.167.498.551,00	74.126.106.593,15	(13.041.391.957,85)	85,04%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	234.825.078.874,00	229.750.644.724,05	(5.074.434.149,95)	97,84%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.801.429.000,00	12.410.974.169,00	(1.390.454.831,00)	89,93%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.500.000.000,00	2.909.275.800,00	(28.590.724.200,00)	9,24%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	31.500.000.000,00	2.909.275.800,00	(28.590.724.200,00)	9,24%
	Jumlah Belanja	2.696.250.712.678,00	2.503.875.571.982,07	(192.375.140.695,93)	92,87%
2.4	TRANSFER	685.095.362.608,00	683.839.951.508,00	(1.255.411.100,00)	99,82%
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten	16.309.922.500,00	16.309.922.500,00	0,00	100,00%
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten	400.476.800,00	360.800.000,00	(39.676.800,00)	90,09%
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.4	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.5	Bantuan Keuangan ke Desa	668.384.963.308,00	667.169.229.008,00	(1.215.734.300,00)	99,82%
2.4.6	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah Belanja dan Transfer	3.381.346.075.286,00	3.187.715.523.490,07	(193.630.551.795,93)	94,27%
	Surplus/(Defisit)	(317.766.071.754,00)	(254.449.579.034,24)	63.316.492.719,76	80,07%
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	155.087.500.325,00	155.087.500.325,44	0,44	100,00%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	198.935.958.261,46	(1.064.041.738,54)	99,47%
3.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	129.365.000,00	129.365.000,00	0,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	355.087.500.325,00	354.152.823.586,90	(934.676.738,10)	99,74%
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.321.428.571,00	26.200.772.165,10	(11.120.656.405,90)	0,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	37.321.428.571,00	26.200.772.165,10	(11.120.656.405,90)	70,20%
	Pembiayaan Netto	317.766.071.754,00	327.952.051.421,80	10.185.979.667,80	103,21%
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	73.502.472.387,56	73.502.472.387,56	0,00%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2022

1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Lamongan pada umumnya timbul karena potensi dan kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan peluang yang tidak dimanfaatkan. Adapun permasalahan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan cenderung stagnan. Disisi yang lain pengeluaran perkapita masih dibawah rata-rata provinsi dan belum merata.
2. Kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih berada di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur.
3. Rata-rata lama sekolah mengalami stagnasi dan belum mencapai target wajib belajar 9 tahun.
4. Perlu penurunan Angka Kematian Balita dan Ibu, kasus balita stunting dan gizi buruk serta penanganan penyakit yang menular dan tidak menular.
5. Belum semua jalan, jembatan, dan jaringan irigasi dalam kondisi baik.
6. Belum optimalnya ketersediaan air baku dan akses layanan air bersih.
7. Masih terdapat kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni
8. Masih adanya pelanggaran perda dan kejadian konflik sosial.
9. Terdapatnya wilayah yang rawan bencana banjir dan kekeringan.
10. Masih tingginya Angka pengangguran terbuka (TPT)

11. Adanya penurunan produksi tanaman pangan, terutama komoditas jagung dan kedelai, demikian pula untuk komoditas perkebunan terutama tebu.
12. Kesejahteraan petani mengalami stagnasi.
13. Rendahnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) serta masih rendahnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
14. Masih minimnya desa yang berkategori mandiri.
15. Belum optimalnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
16. Belum semua situs, seni dan budaya terlestarikan serta pengembangan kepariwisataan.
17. Pertumbuhan lapangan usaha perindustrian dan perdagangan kecenderungannya mengalami penurunan. Serta adanya penurunan aksesibilitas usaha mikro terhadap modal usaha pada lembaga keuangan.
18. Realisasi Investasi Fluktuatif
19. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

a) Visi Kepala Daerah

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Konsep Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 2021-2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan terhadap arah pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026, adalah:



“ *Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan* “

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kejayaan dan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Terwujudnya, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
- 2) Kejayaan, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
- 3) Berkeadilan, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan

pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Semangat kejayaan yang berkeadilan dapat direpresentasikan dengan kemandirian dan kesejahteraan serta pemerataan. Secara teknis dapat diintervensi melalui sinergitas antar *stakeholder* pembangunan yakni masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan sektor swasta serta akademisi sebagai suporting dalam pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan.

b) Misi Kepala Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan **5 (lima) Misi Kabupaten Lamongan** Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- ❖ **Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah,** dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif. Ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif

pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Selain itu kesejahteraan petani dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan.

❖ **Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak** Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada upaya pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi Olahraga.

❖ **Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan**, dengan penjelasan sebagai berikut :

Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Infrastruktur. Dalam rangka mewujudkan kepuasan atas kinerja infrastruktur, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas

layanan dan konektivitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap resiko bencana.

- ❖ **Misi 4 : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius- Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai Kebudayaan bagi Masyarakat. Reppresentasi ketercapaiannya yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran, solidaritas sosial dan stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal.

- ❖ **Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan janji-janji atau platform politik tersebut kemudian didefinisikan kedalam program,

kegiatan atau sub kegiatan yang mengacu pada Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun 11 program prioritas Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 berdasarkan platform politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan
Jangka Menengah

No	Perangkat Daerah	Program
1	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
2	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3	RSUD SOEGIRI	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	RSUD NGIMBANG	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Jalan

6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase - Program Penataan Bangunan Gedung - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penanggulangan Bencana
10	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penanganan Fakir Miskin - Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan

		<p>Sosial (PSKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
11	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) - Program Perlindungan Khusus Anak
13	Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan
14	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) - Prgram Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan idup (PPLH) - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk

		<p>Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Persampahan
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Program Pengelolaan Profil Kependudukan
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penataan Desa
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Penduduk - Program Pembinaan Keluarga Berencana - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Program Informasi Dan Komunikasi Publik - Program Aplikasi Informatika - Program Penyelenggaraan Statistik - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
19	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) - Program Pengembangan Umkm
21	Dinas Penanaman	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal

	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pengembangan Kesenian Tradisional - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Museum Kabupaten/Kota - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
24	Dinas Perpustakaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan Perpustakaan - Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
25	Dinas Kearsipan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
26	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

		- Program Penyuluhan Pertanian
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri - Program Pengendalian Izin Usaha Industri - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
30	Inspektorat	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
33	Badan Pendapatan Daerah	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
34	Badan Kepegawaian Daerah	- Program Kepegawaian Daerah - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Badan Penelitian dan Pengembangan	- Program Penelitian Dan Pengembangan

	Daerah	
36	Sekretariat DPRD	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
38	Sekretariat Daerah	- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - Program Perekonomian Dan Pembangunan - Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
39	Kecamatan Lamongan	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40	Kecamatan Babat	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan

		Desa
41	Kecamatan paciran	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
42	Kecamatan Brondong	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
43	Kecamatan Turi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
44	Kecamatan Pucuk	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
45	Kecamatan Sukodadi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
46	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan

	Tikung	<p>Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
47	Kecamatan Deket	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
48	Kecamatan Kalitengah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
49	Kecamatan Kembangbahu	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
50	Kecamatan Mantup	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan

		<p>Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
51	Kecamatan Modo	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
52	Kecamatan Bluluk	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53	Kecamatan Karangbinangun	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
54	Kecamatan Glagah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan

		<p>Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
55	Kecamatan Ngimbang	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
56	Kecamatan Sugio	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
57	Kecamatan Karanggeneng	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
58	Kecamatan Sambeng	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
59	Kecamatan laren	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan

		<p>Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60	Kecamatan Kedungpring	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
61	Kecamatan Sekaran	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
62	Kecamatan sarirejo	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
63	Kecamatan Solokuro	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
64	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan

	Maduran	Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
65	Kecamatan Sukorame	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sumber data : Bappelitbangda Tahun 2022

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tabel 1.6

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan (Tahun 2022)

No	Perangkat Daerah	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	RSUD SOEGIRI	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

		<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
4	RSUD NGIMBANG	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
8	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

		<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
10	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Stimulan dan Sarana Penataan Lingkungan Sosial - Bantuan Stimulan dan Sarana Penataan Lingkungan Sosial - Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan - Pendataan dan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pemberdayaan Lanjut Usia terlantar - Pemulangan/Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yang Terjaring Razia - Operasional pengelolaan penampungan sementara bagi PMKS - Bantuan sosial alat bantu bagi warga disabilitas - Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi anak Bermasalah

		<ul style="list-style-type: none"> - Operasional Pendampingan dan Pendataan penerima Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat - Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (KUBE PACA) - Pengadaan sarana dan prasarana alat bantu bagi lanjut usia terlantar - Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) - Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) - Tali Asih bagi veteran pejuang kemerdekaan, Janda Pahlawan dan Warakawuri - Pembinaan Family Care Unit (FCU) - Operasional pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan dan HKSAN - Pengadaan sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) - Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) - Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan Barang Bencana - Pendataan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Penguatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan - Operasional penanganan bantuan sosial bagi korban bencana sosial - Operasional dan Penyewaan Rumah Singgah Pasien Rujukan RSUD Dr. Soetomo Surabaya - Pemulangan orang terlantar, kehabisan bekal dan kecopetan
11	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

		<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota - Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

		<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
13	Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
14	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - Penyimpanan Sementara Limbah B3

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - .Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - .Pengelolaan Sampah
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - Pelayanan Pencatatan Sipil - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Penyusunan Profil Kependudukan
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Penataan Desa - Fasilitasi Kerjasama Desa - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan

		Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten / kota serta Pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / kota
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota - Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup

		<p>Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
19	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

	Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Penyadaran. Pemberdayaan. dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat

		<p>Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
24	Dinas Perpustakaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota - Pembudayaan Gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota - Pelestarian naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota
25	Dinas Kearsipan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI

- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
- Pemusnahan Arsip dilingkungn Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- Penilaian, Penetaan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
- Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
- Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang
- Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

26	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah KAbupaten/Kota - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Diusahakan Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung

		<p>Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Prasarana Pertanian - Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya - Pembangunan Prasarana Pertanian - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung

	Hewan	<p>Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Mutu dan peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan Prasarana Pertanian - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengawasan dan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

		<p>Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
30	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Pengawasan Desa - Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP - Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP - Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Pendampingan dan Asistensi - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Kerjasama Pengawasan Internal - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Pendampingan dan Asistensi - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
32	Badan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran

	Keuangan dan Asset Daerah	<p>Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - Pengelolaan Barang Milik Daerah
33	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pendapatan Daerah
34	Badan Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - Mutasi dan Promosi ASN - Pengembangan Kompetensi ASN - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengembangan Kompetensi Teknis - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Pencatatan Sipil - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
36	Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Pembahasan Kebijakan Anggaran - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - Peningkatan Kapasitas DPRD - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Kerjasama Daerah - Fasilitasi tugas DPRD
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
38	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi dan Koordinasi hukum - Penataan Organisasi - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Fasilitasi Kejasama Daerah - Administrasi Tata Pemerintahan - Pemantauan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Fasilitasi Penyusunan Program Administrasi Pembangunan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
39	Kecamatan Lamongan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Pemberdayaan Kelurahan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40	Kecamatan Babat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Pemberdayaan Kelurahan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
41	Kecamatan paciran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Pemberdayaan Kelurahan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
42	Kecamatan Brondong	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah

		<p>yang Ada di Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Pemberdayaan Kelurahan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
43	Kecamatan Turi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
44	Kecamatan Pucuk	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
45	Kecamatan Sukodadi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
46	Kecamatan Tikung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
47	Kecamatan Deket	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
48	Kecamatan Kalitengah	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
49	Kecamatan Kembangbahu	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
50	Kecamatan Mantup	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
51	Kecamatan Modo	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
52	Kecamatan Bluluk	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53	Kecamatan Karangbinangun	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - koordinasi upyah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
54	Kecamatan Glagah	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang

		<p>ada di Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
55	Kecamatan Ngimbang	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
56	Kecamatan Sugio	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
57	Kecamatan Karanggeneng	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
58	Kecamatan Sambeng	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
59	Kecamatan Kedungpring	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan

		dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60	Kecamatan Sekaran	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
61	Kecamatan sarirejo	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
62	Kecamatan Solokuro	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
63	Kecamatan Maduran	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
64	Kecamatan Sukorame	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
65	Kecamatan Laren	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sumber data : Bappelitbangda Tahun 2022

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

❖ DASAR HUKUM DALAM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ADALAH:

- ✓ Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan berdasarkan SPM, SPM menjadi prioritas baik perencanaan maupun anggaran
- ✓ PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM;
Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya
- ✓ Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;
Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM dalam DOKREN, dan pelaksanaan SPM pelaporan dan evaluasi
- ✓ Peraturan Menteri Teknis Terkait Dengan Penerapan SPM, yaitu :
 1. **Bidang Pendidikan**
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
 2. **Bidang Kesehatan**
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 3. **Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat**
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
 4. **Bidang Trantibumlinmas**
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
 - Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
 - Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

- Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Bidang Sosial

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial Pada Standar Pelayanan Minimal di Provinsi dan di Kabupaten/Kota

❖ TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN LAMONGAN SELAMA SATU TAHUN

1. URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 1.7
Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%
3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%

2. URUSAN KESEHATAN

Tabel 1.8
Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	100%
2. Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	100%
3. Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
4. Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
6. Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabet Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat	Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus (Hiv)	Jumlah orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100%

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Tabel 1.9
Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Tabel 1.10
Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%

5. URUSAN TRANTIBUNLINMAS

Tabel 1.11
Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%

3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

6. URUSAN SOSIAL

Tabel 1.12
Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Tahun 2022 di Kabupaten Lamongan menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut (lebih jelas sebagaimana **Lampiran 1**) :

Tabel 2.1

Capaian kinerja makro Tahun 2022 di Kabupaten Lamongan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021 (N-1)	Capaian Kinerja Tahun 2022 (N)	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,12	74,02	1,230
2	Angka Kemiskinan	13,86	12,53	-9,595
3	Angka Pengangguran	6,05	4,90	23,46
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,43	5,56	62,09
5	Pendapatan Per Kapita	41.04	45.44	10,72
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,292	0,273	-6,506

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Terlampir (Lampiran 2)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Terlampir (Lampiran 3)

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terlampir (Lampiran 4)

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja yang disusun dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (**Renstra**) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (**RKPD**) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat, sehingga kemudian sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban yang diukur adalah sasaran, program dan kegiatan yang prosesnya adalah sejauh mana sasaran, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran ataupun Tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan. Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan beserta indikatornya, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, sebagai pedoman pengambilan kebijakan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2022 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026. Secara umum program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari **23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis** dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026 dan secara umum untuk Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan tercapai seiring Pandemi Covid-19 yang mulai mereda. Apabila terdapat indikator kinerja yang capaian kinerjanya dalam monitoring dan evaluasi belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan secepatnya dilakukan evaluasi dan upaya-upaya perbaikan lebih lanjut.

Dari **Kelima Misi** tersebut diimplementasikan menjadi **5 (lima) Tujuan** dengan **7 (tujuh) Indikator Tujuan** dan **19 (sembilan belas) Sasaran** dengan **27 (dua puluh tujuh) Indikator Sasaran** yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Selanjutnya telah ditetapkan Peraturan Bupati Lamongan No. 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022, dengan **325 (tiga ratus dua puluh lima) Program**, **830 (delapan ratus tiga puluh) Kegiatan** dan **2.344 (dua ribu tiga ratus empat puluh empat) Sub Kegiatan** yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui Selisih atau Celah kinerja baik positif atau negatif (**Performance gap**). Selanjutnya atas dasar selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapat strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (**Performance improvement**).

Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Tujuan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan, yaitu antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Gini Rasio
3. Prosentase Penduduk Miskin
4. Indeks Pembangunan Manusia
5. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
6. Indeks Kesalehan Sosial
7. Indeks Reformasi Birokrasi..

Adapun target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan Tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut :

Misi I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,55%
2.	Gini Rasio	0,292
3.	Prosentase Penduduk Miskin	13,39%

Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2022
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Ber- wawasan Lingkungan

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2022
1.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	77

Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tenram.

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2022
1.	Indeks Kesalehan Sosial	63,06

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Tujuan : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2022
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	68 (B)

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui Selisih atau Celah kinerja baik positif atau negatif (**Performance gap**). Selanjutnya atas dasar selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapat strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (**Performance improvement**).

Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Tujuan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan, yaitu antara lain :

8. Pertumbuhan Ekonomi
9. Gini Rasio
10. Prosentase Penduduk Miskin

11. Indeks Pembangunan Manusia
12. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
13. Indeks Kesalehan Sosial
14. Indeks Reformasi Birokrasi..

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan Tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut :

Misi I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2020	REALISASI 2021	2022		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-2,65%	3,43%	3,55%	5,56%	156,62
2.	Gini Rasio	0,294	-	0,292	0,273	106,96
3.	Prosentase Penduduk Miskin	13,85%	13,86%	13,39%	12,53%	106,86

Terhadap realisasi capaian Indikator Tujuan diatas, pada tahun 2022 semua indikator sebanyak 3 (tiga) indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Terhadap indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Prosentase pertumbuhan ekonomi

Mulai tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mendapat tekanan yang berat mengalami kontraksi sebesar -1,16% karena dampak yang signifikan adanya Pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan mulai Tribulan Ketiga Tahun 2021 tumbuh meski belum tinggi dan sampai dengan akhir tahun 2021 tumbuh sebesar 3,43%. Kondisi tersebut masih lebih baik jika dibandingkan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini disebabkan masih adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak secara langsung pada ekonomi Global dan berimbas pada perekonomian Regional, Nasional maupun Daerah. Pada tahun 2022 dengan kondisi perekonomian yang sudah kembali normal, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan menjadi 5,56%.

b. PDRB per Kapita

Tahun 2021, capaian angka PDRB per Kapita Kabupaten Lamongan Atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha sebesar **Rp. 41.042.888,60**. Sedangkan PDRB per Kapita tahun 2022 dengan capaian sebesar **Rp. 45.441.047,30** meningkat jika dibanding capaian tahun 2021. Hal ini didukung oleh kondisi roda perekonomian lokal, regional dan global yang sudah kembali normal sehingga banyak

perusahaan-perusahaan dan pelaku-pelaku usaha yang mulai aktif bergerak dan bangkit kembali.

Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2020	REALISASI 2021	2022		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,58	73,12	73,29	74,02	100,99

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Pembangunan Manusia (**IPM**), merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lamongan terus mengalami kenaikan, tahun 2022 nilai capaian IPM adalah **74,02** sedangkan tahun 2021 nilai capaian IPM adalah **73,12**. Hal ini karena didukung strategi dan arah kebijakan yang tepat dalam upaya mewujudkan peningkatan capaian tren positif IPM yang mencakup Indeks Pendidikan, melalui program dan kegiatan antara lain yaitu Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan, Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karier, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan profesi dan kompetensi, Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standart melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru, Pemeliharaan gedung, ruang penunjang pendidikan dan peralatan pendidikan, Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun siswa kurang mampu, Pemberian beasiswa mahasiswa bagi keluarga kurang mampu (GAKIN), Mendorong gerakan budaya membaca/literasi dan numerasi masyarakat, Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan lembaga Sekolah, Gerlamsesaku 9 gerakan membaca 1 hari 1 buku. Sedangkan meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Lamongan melalui kegiatan penyediaan armada Mobil Sehat sampai ke seluruh Desa di Kabupaten Lamongan dan kegiatan Home Care Service (HCS) yang dilaksanakan secara lebih optimal.

Nilai capaian IPM di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 sebesar **74,02** lebih tinggi jika dibanding capaian IPM Jawa Timur tahun 2022 sebesar **72,75** dan capaian IPM Nasional tahun 2022 sebesar **72,91**

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Ber- wawasan Lingkungan

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.

No	INDIKATOR (IKU)	BASELINE 2020	REALISASI 2021	2022		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	N/A	80,83	77	77,89	102,87

Terhadap realisasi indikator Tujuan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 77,89 melampaui target yang ditetapkan, dibanding capaian kinerja tahun 2021 sebesar 77. Hal ini didukung adanya program dan kegiatan perbaikan serta pembangunan jalan dan jembatan. Tahun 2021 sebesar 97,5% Panjang jalan dalam kondisi mantap dan 81,15% Jumlah jembatan Kabupaten dalam kondisi baik. Selain itu didukung adanya rehab dan pembangunan irigasi, normalisasi waduk, penanganan banjir secara terintegrasi dan rehab rumah layak huni, pembangunan Rusunawa serta program dan kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tenram.

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2020	REALISASI 2021	2022		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	-	63,06	86,77	109,36

Kebijakan mengenai Kesalehan Sosial penting guna melihat dinamika ruang publik yang berhubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, pelestarian lingkungan, etika dan budi pekerti, juga kepatuhan terhadap negara dan pemerintah. Kesalehan Sosial menunjukkan perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat peduli terhadap masalah-masalah ummat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perpektif orang lain, mampu merasakan apa

yang dirasakan orang lain (berempati) dan seterusnya. Kesalehan Sosial adalah suatu bentuk kesalehan yang tidak cuma ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya sehingga orang lain merasa nyaman, damai dan tentram berinteraksi dan bekerjasama dan bergaul dengannya. Karena itu Kesalehan Sosial mencakup hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, hubungan baik dengan sesama manusia dan hubungan baik dengan alam/lingkungan sekitar.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Tujuan Indeks Kesalehan Sosial tahun 2022 sebesar **86,77** melebihi target yang ditetapkan sebesar **63,06**.

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Tujuan : Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2020	REALISASI 2021	2022		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	66,30	68,35 (B)	68 (B)	70,02 (BB)	102,97

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lamongan, berpengaruh penting terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 sebesar 82,62 naik dibanding tahun 2020 sebesar 81,78.

Pada tahun 2021 capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai sebesar 68,35 (**Predikat B/Baik**), melampaui target yang ditetapkan sebesar ...62,00. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 dengan nilai sebesar 70,02 (**Predikat BB/Sangat Baik**), naik predikat dibanding Tahun 2021. Sebagai komitmen bersama dan sebagai upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 telah dibentuk Agen Perubahan pada setiap Perangkat Daerah dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain berupa Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penerapan berbagai aplikasi elektronik dan menyatukan pelayanan publik dalam Mall Pelayanan Publik (MPP), Peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Diklat dan Manajemen Karier, Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah setiap Semester, Pendampingan Zona Integritas terhadap 100 Unit Pelayanan Publik (sektor Pendidikan, Kesehatan, Perangkat Daerah dan Kelurahan/Desa).

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Pengukuran capaian indikator kinerja setiap Sasaran dikelompokkan berdasarkan **Misi** dan **Tujuan** sebagai berikut :

I. Misi I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

Pada **Misi I**, didukung oleh 5 (lima) Sasaran dan 10 (sepuluh) indikator Sasaran, disajikan dalam tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	73,97	88,99	BPS belum rilis	-
		Nilai Tukar Petani	104,86	106,81	109,26	104,19
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	4,13%	0,71%	4,50%	108,96
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,97%	4,90%	6,05%	-21,73
		Indeks Daya Beli	0,761	-	0,748	
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,5%	-1,37	3,94%	788
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2,85%	7,03	6,91%	242,46
		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	1,95%	7,20	7,98%	409,23
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	1,5%	42,00%	27,76%	1.850,67
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	175.500.000.000,-	-	462.810.775.483,-	263,71

Sasaran 1, Meningkatkan Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat, dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dari 2 (dua) indikator Sasaran diatas, realisasi capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2022 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan realisasi capaian Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2022 sebesar 109,26 melebihi target yang ditetapkan sebesar 104,86 atau terealisasi sebesar 104,19%.

Sasaran 2, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Bagian Perekonomian.

Dari 3 (tiga) indikator Sasaran diatas, terdapat 2 (dua) indikator terealisasi pada tahun 2022 realisasinya melampaui target yaitu indikator %PPKS yang meningkat kapasitasnya terealisasi sebesar 4,50% meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 0,71%, dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,13%. Demikian juga untuk indikator Indeks Daya Beli pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,748 melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,761.

Sedangkan untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2002 terealisasi sebesar 6,05%, meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 4,90% dan tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 4,97%.

Sasaran 3, Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan, *dilaksanakan secara kolaboratif* oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dari 3 (tiga) indikator Sasaran diatas, realisasi capaian pada tahun 2022 semuanya melampaui target yang ditetapkan dan jika dibanding realisasi tahun 2021 semuanya meningkat. Indikator %Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan %Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 3,94%, meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar -1,37% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,5%.

Indikator %Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2022 terealisasi sebesar 6,91%, sedikit menurun dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 7,20% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,85%.

Demikian pula indikator %Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2002 terealisasi sebesar 7,98%, meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 7,03% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,95%.

Sasaran 4, Meningkatnya Efektifitas Investasi, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tahun 2022 realisasi capaian indikator %Peningkatan Realisasi Investasi sebesar 27,76%, menurun jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 42,00% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,5%.

Sasaran 5, Meningkatnya Belanja Wisatawan, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selama tahun 2022 realisasi capaian indikator Jumlah Pengeluaran Wisatawan sebesar Rp 462.810.775.483,- dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,5%.

Dalam mewujudkan **Misi I** tersebut juga didukung dengan Program Perangkat Daerah yang dikolaborasikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang optimal

II. Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zama

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

Pada **Misi II**, didukung dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Sasaran, disajikan dalam tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAI- AN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,64	0,651	0,667	104,22
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,808	0,808	0,813	100,62
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	53,60	-	59,17	110,39

Sasaran 1, Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pada tahun 2022 indikator Indeks Pendidikan terealisasi sebesar **0,667** meningkat jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 0,651 dan melampaui target yang ditetapkan sebesar **0,64**.

Sasaran 2, Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Indikator Indeks Kesehatan pada tahun 2022 terealisasi sebesar **0,813** meningkat jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 0,808 dan melampaui target yang ditetapkan sebesar **0,808**.

Sasaran 3, Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Indikator Indeks Pembangunan Kepemudaan pada tahun 2022 terealisasi sebesar **59,17** dan melampaui target yang ditetapkan sebesar **53,60**

III. Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Ber- wawasan Lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan.

Pada **Misi III**, terdapat 3 (tiga) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAI- AN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	81,33	-	79,52	97,77
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,69	70,61	64,70	104,88
3.	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,60		0,70	116,67

Sasaran 1, Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata, dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PU Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta Dinas Perhubungan.

Pada tahun 2022 indikator Indeks Infrastruktur terealisasi sebesar 79,52 sedikit menurun jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 80,24 dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 81,33.

Sasaran 2, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 terealisasi sebesar 64,70 sedikit menurun jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 64,92 dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 61,69.

Sasaran 3, Meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Indikator Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,70 dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,60

IV. Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Relegius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tenram.

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

Pada **Misi IV**, terdapat 4 (empat) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAI- AN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	67,60	-	87,42	129,32
2.	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	66,30	-	88,79	133,92
3.	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong	Nilai Solidaritas	64,06	-	86,77	135,90
4.	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,70	-	55,99	102,36

Sasaran 1, Meningkatnya Toleransi, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2022 indikator Nilai Toleransi terealisasi sebesar 87,42, melampaui target yang ditetapkan sebesar 67,60.

Sasaran 2, Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Indikator Nilai Stabilitas pada tahun 2022 terealisasi sebesar 88,79 melampaui target yang ditetapkan sebesar 66,30.

Sasaran 3, Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong, dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Indikator Nilai Solidaritas pada tahun 2022 terealisasi sebesar 86,77 melampaui target yang ditetapkan sebesar 64,06.

Sasaran 4, Meningkatnya Masyarakat Berbudaya, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 55,99 melampaui target yang ditetapkan sebesar 54,70.

V. Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Tujuan : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

Pada **Misi V**, terdapat 4 (empat) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAI- AN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	83,22	82,62	83,78	100,67
		Indeks SPBE	3,65	3,32	2,82	
2.	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	65,00	87,73	63,26	
3.	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	A	A	A	100,00
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00
		Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	100,00
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	75,00%	112,50%	506,25%	450,00

Sasaran 1, Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2022 indikator Nilai IKM terealisasi sebesar 83,78 meningkat jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 82,62 dan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 83,22. Untuk indikator Indeks SPBE realisasi

tahun 2022 sebesar 2,82 menurun jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 3,32 dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,65.

Sasaran 2, Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Pada tahun 2022 indikator Indeks Profesionalitas ASN terealisasi sebesar 63,26 menurun jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 87,73 dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 65,00.

Sasaran 3, Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2022 indikator Predikat SAKIP, Opini BPK dan Maturitas SPIP semuanya mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran 4, Meningkatnya Kemandirian Desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada tahun 2022 indikator Prosentase Peningkatan Desa Mandiri terealisasi sebesar 506,25% meningkat jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 112,50% dan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 75,00%

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

1) Misi I dengan 1 (satu) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran serta 10 (sepuluh) indikator kinerja Sasaran.

Misi I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

Pada **Misi I**, terdapat 5 (lima) Sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	74,05	88,99	BPS belum rilis	-
		Nilai Tukar Petani	104,90	106,81	109,26	104,19
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	4,88%	-	4,50%	108,96
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,07%	4,90%	6,05%	
		Indeks Daya Beli	0,794	-	0,748	
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,5%	-1,37	3,94%	788
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	6,92%	7,20	6,91%	242,46

		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	7,39%	7,03	7,98%	409,23
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	3,5%	42,00%	27,76%	1.850,67
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	268.500.000.000,-	-	462.810.775.483,-	263,71

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 5 (lima) indikator Sasaran telah melampaui target kinerja Jangka Menengah yang ditetapkan. Namun terdapat 1 (satu) indikator Sasaran yang menurun dari target kinerja Jangka Menengah yang ditetapkan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tentu hal tersebut merupakan tantangan tersendiri yang harus dilakukan penanganan melalui langkah-langkah strategis.

2) Misi II dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran serta 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran.

Misi II : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.

Pada **Misi II**, terdapat 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,644	0,651	0,667	104,22
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,811	0,808	0,813	100,62
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	55,60	-	59,17	110,39

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator atau semua indikator Sasaran pada Misi II telah tercapai bahkan melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

3) Misi III dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran serta 3 (tiga) Indikator kinerja Sasaran.

Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan.

Pada **Misi III**, terdapat 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI		CAPAI-AN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	83,33	-	79,52	97,77
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,74	64,92	64,70	104,88
3.	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,68	-	0,70	116,67

Pada tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator Sasaran telah melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

4) Misi IV dengan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran serta 4 (empat) Indikator kinerja Sasaran.

Misi IV : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Relegius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tenram.

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

Pada **Misi IV**, terdapat 4 (empat) Sasaran dengan 4 (empat) indikator dan disajikan dalam tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI		CAPAI-AN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	79,08	-	87,42	129,32
2.	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	71,77	-	88,79	133,92
3.	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong	Nilai Solidaritas	70,71	-	87,06	135,90
4.	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,50	-	55,99	102,36

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 4 (empat) indikator atau semua indikator Sasaran pada Misi IV telah tercapai bahkan melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

5) Misi V dengan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran serta 7 (tujuh) Indikator kinerja Sasaran.

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Tujuan : Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

Pada **Misi V**, terdapat 4 (empat) Sasaran dengan 7 (tujuh) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMD Th. 2026	REALISASI		CAPAI-AN (%)
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	85,73	82,62	83,78	100,67
		Indeks SPBE	4,00	3,32	2,82	77,26
2.	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	74,00	87,73	63,26	97,32
3.	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	A	A	A	100,00
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00
		Maturitas SPIP	Level 4	Level 3	Level 3	100,00
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	375,00%	112,50%	506,25%	450,00

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator Sasaran telah tercapai bahkan melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

6) ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, maka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007. Untuk sinkronisasi dengan ketentuan yang lebih tinggi sesuai karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 02 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya secara rinci terkait alokasi Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Anggaran setelah Perubahan) dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan indikator kinerjanya, disajikan sebagaimana tabel berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI I				
1.	Sasaran 1 , Urusan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas PP dan PA, Dinas KPP, Dinas Peternakan dan Keswan)	91.038.310.810,00	82.283.188.360,55	91,89
2.	Sasaran 2 , Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Dinas Sosial, Disnaker)	24.600.109.209,00	23.961.787.977,00	97,41
3.	Sasaran 3 , Urusan Perekonomian (Disperindag, Dinkopum, Dinas Perikanan)	31.956.743.647,00	30.203.851.761,10	94,51
4.	Sasaran 4 , Urusan Investasi (DPMPTSP)	6.915.729.002,00	6.410.215.480,97	92,69
5.	Sasaran 5 , Urusan Pariwisata (Disparbud)	2.292.022.000,00	1.441.969.170,00	62,91
Anggaran & realisasi Sasaran (10 indikator)		.156.802.914.668,00	144.301.012.748,62	92,03

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **2 (dua)** Sasaran pada **Misi I** dengan rata-rata prosentase sebesar **92,03%** atau terdapat efisiensi sebesar $(376,72\% - 92,03\%) = 284,7\%$.

NO	UR	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI II				
1.	Sasaran 1 , Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)	848.346.569.342,00	833.428.656.710,00	98,24
2.	Sasaran 2 , Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD)	723.284.941.873,00	651.604.345.993,70	92,23
3.	Sasaran 3 , Urusan Kepemudaan (Dispora)	21.053.741.347,00	19.647.112.954,57	93,32
Anggaran & realisasi Sasaran (3)		1.592.685.252.562,00	1.504.680.115.658,0	94,47

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **3 (tiga)** Sasaran pada **Misi II** dengan

rata-rata prosentase sebesar **94,47%** atau terdapat efisiensi sebesar $(105,08\% - 94,47\%) = 10,61\%$.

NO	URAI A	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI III				
1.	Sasaran 1 , Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PU Bina Marga)	90.000.000,00	90.265.000,00	100,29
	Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PU SDA)	100.000.000,00	100.028.035,00	100,03
	Dinas Perhubungan	10.100.000.000,00	8.942.742.000,00	88,54
	Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman)	85.434.157.713,00	82.119.113.400,00	96,12
P 2. a	Sasaran 2 , Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	375.000.000,00	125.075.000,00	33,35
d 3. a	Sasaran 3 , Urusan Penanggulangan Bencana (BPBD)	5.160.861.750,00	5.029.714.634,00	97,46
Anggaran & realisasi Sasaran (9 indikator)		101.260.019.463,00	96.406.938.069,00	95,21

tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **3 (tiga)** Sasaran pada **Misi III** dengan rata-rata prosentase sebesar **95,21%** atau terdapat efisiensi sebesar $(106,44\% - 95,21\%) = 11,23\%$.

NO	URAI A	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI IV				
1.	Sasaran 1 , Urusan Toleransi Sosial (Bakesbangpol)	9.569.021.690,00	9.417.959.529,00	98,42
2.	Sasaran 2 , Urusan Ketenteraman & Ketertiban Umum (Satpol PP)	18.099.748.054,00	14.691.945.965,00	81,17
3.	Sasaran 3 , Urusan Sosial (Dinas Sosial)	7.158.291.070,00	6.785.689.559,00	91,42
4.	Sasaran 4 , Urusan Kebudayaan (Disparbud)	305.000.000,00	304.685.326,00	99,97
Anggaran & realisasi Sasaran (10 indikator)		35.132.060.814,00	31.200.280.379,00	88,81

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **4 (empat)** Sasaran pada **Misi IV** dengan rata-rata prosentase sebesar **88,81%** atau terdapat efisiensi sebesar $(125,38\% - 88,81\%) = 36,57\%$

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI V				
1.	Sasaran 1 , Urusan Pelayanan Publik (Dinas Kominfo, Bag. Organisasi Setda)	12.672.508.012,00	12.381.007.667,00	97,70
2.	Sasaran 2 , Urusan Kapasitas ASN (BKPSDM)	11.092.307.200,00	10.411.744.880,36	93,86
3.	Sasaran 3 , Urusan Manajemen Pemerintahan (Bapelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda)	772.316.010.464,00	734.883.438.342,00	95,15

4.	Sasaran 4, Urusan Kemandirian Desa (Dinas PEMBERDAYAAN dan Desa, Masyarakat dan Desa,	102.382.323.220,00	95.658.945.200,33	93,43
Anggaran & realisasi Sasaran (7 indikator)		898.463.148.896,00	853.335.136.089,36	94,98

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **4 (empat)** Sasaran pada **Misi V** dengan rata-rata prosentase sebesar **94,98%** terdapat efisiensi sebesar $(146,46\% - 94,98\%) = 251,48\%$.

Selanjutnya apabila dirata-rata, prosentase realisasi anggaran dari **Kelima Misi** dan **Kelima Tujuan** tersebut adalah sebesar **93,10%**. Dengan prosentase realisasi anggaran tersebut, ternyata dapat tercapai keberhasilan- keberhasilan pencapaian target-target kinerja Sasaran dan indikator Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 khususnya pada target-target kinerja yang telah ditetapkan di Tahun Anggaran 2022.

Dan jika dihitung efisiensi penggunaan sumber daya secara keseluruhan dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut : $172,02\%$ (% rerata capaian kinerja) – $93,10\%$ (% rerata capaian anggaran) = **78,92%**

7) ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Adapun secara rinci dapat dijelaskan Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja sebagai berikut :

- 1) **Misi I**, dengan 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja. Apabila dirata-rata capaian 2 (dua) Sasaran tersebut sebesar **376,72% (Sangat Berhasil)**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 4** “Meningkatnya efektifitas investasi” dengan indikator %Peningkatan Realisasi Investasi, sebesar **1.850,67%**, , sebagaimana tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemberdaya- an dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	Data belum dirilis BPS	Dinas PP dan PA
		Nilai Tukar Petani	104,19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	108,96	Dinas Sosial
		Tingkat Pengangguran Terbuka	-	Dinas Tenaga Kerja
		Indeks Daya Beli	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Peternakan dan Kes. Hewan
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	788	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar	242,46	Dinas Perindag Dinas Koperasi

		dan Eceran		
		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	409,23	
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	1.850,67	Dinas PM dan PTSP
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	263,71	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah indikator & capaian		10	3.767,22	
Rata-rata capaian kinerja 5 Sasaran			376,72	(Sangat Berhasil)

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi I antara lain adalah :

Sasaran 1 :

- a. Program Pengarusutamaan Gender, Program Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak dan Program Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sasaran 2 :

- a. Program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- c. Program Pengolahan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan..

Sasaran 3 :

- a. Program Pengolahan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

c. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan UMKM, Program Pengembangan UMKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sasaran 4 :

Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal , yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sasaran 5 :

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Wisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- 2) **Misi II**, dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **105,08%** (Sangat Berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, “Indeks Pembangunan Pemuda” sebesar **110,39%** diikuti Sasaran 1 sebesar 104,22% dan Sasaran 2 sebesar 100,62%, sebagaimana tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	104,22	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	100,62	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	110,39	Dinas Pemuda dan Olahraga
Jumlah indikator & capaian		3	315,23%	
Rata-rata capaian kinerja 3 Sasaran Strategis			105,08% (Sangat Berhasil)	

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :

Sasaran 1 :

Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Sasaran 2 :

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soegiri dan RSUD Ngimbang.

Sasaran 3 :

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

- 3) **Misi III**, dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **106,44% (Sangat Berhasil)**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, “Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana” sebesar **116,67%** yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti Sasaran 2 sebesar 104,88%. Kedua sasaran tersebut memiliki capaian kinerja cukup tinggi dengan kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2022	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	97,77	Dinas PU Bina Marga, DPU SDA Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Cipta Karya
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	104,88	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	116,67	BPBD
Jumlah indikator & capaian		3	319,32%	
Rata-rata capaian kinerja 3 Sasaran			106,44% (Sangat Berhasil)	

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :

Sasaran 1 :

Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Sasaran 2 :

Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran, dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Sasaran 3 :

Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 4) **Misi IV**, dengan 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja dan semua memenuhi target yang ditetapkan. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **125,38% (Sangat Berhasil)**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, “Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong” sebesar **135,90%**, diikuti Sasaran 2 sebesar 133,92% dan Sasaran 1 sebesar 129,32%, sebagaimana tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	129,32	Bakebangpol
2.	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	133,92	Satpol PP
3.	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong	Nilai Solidaritas	135,90	Dinas Sosial
4.	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	102,36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah indikator & capaian		4	501,50%	
Rata-rata capaian kinerja 4 Sasaran Strategis			125,38% (Sangat Berhasil)	

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :

Sasaran 1 :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Penanganan Bencana, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial
- 5) **Misi V**, dengan 4 (empat) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja, 5 (lima) indikator memenuhi target yang ditetapkan dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target. Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **146,46%**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 4**, “Meningkatnya Kemandirian Desa” sebesar **450,00%**, berikutnya Sasaran 1

“Meningkatnya pelayanan publik yang inovatif” sebesar 100,67%, selanjutnya Sasaran 3 sebesar masing-masing 100,00% sebagaimana tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2022 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM	100,67	Bagian Organisasi Setda
		Indeks SPBE	77,26	Dinas Kominfo
2.	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	97,32	BKPSDM
3.	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	100,00	Bapelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi
		Opini BPK	100,00	BPKAD
		Maturitas SPIP	100,00	Inspektorat
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	450,00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah indikator & capaian		7	1.025,25	
Rata-rata capaian kinerja 4 Sasaran Strategis			146,46% (Sangat Berhasil)	

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :

Sasaran 1 :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sasaran 2 :

Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sasaran 3 :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Sasaran 4 :

Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN****1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- 7) Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0442/M.PPN/11/2010, Nomor : SE-696/MK/2010 dan Nomor : 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah dapat di biayai melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada

daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dana tugas pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan sedangkan pendanaan dekon dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat di daerah.

Adapun tujuan diberikannya tugas pembantuan dan dekonsentrasi yaitu untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, tugas pembantuan dan dekonsentrasi juga untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah dan desa tersebut.

Kegiatan-kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dari Pemerintah Pusat kepada beberapa kementerian/lembaga terdiri dari:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Sekolah Menengah)
- b. DITJEN LINJAMSOS RI. Program PKH, PBI-N (Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), KSM)
- c. Ditjen Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Sosial Republik Indonesia (Program Pemberdayaan Sosial dan Kemiskinan)
- d. DITJEN Penanganan Fakmis Kementrian Sosial RI (Program Pengentasan Kemiskinan Pedesaan dan Program Sembako)
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi
- g. Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian
- h. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- i. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
- j. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI
- k. Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor : PHD-058/IPDMIP/PK/2018 untuk *Intregrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program- IPDMIP* (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Parsipatif Terpadu)

- I. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- m. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Penjabaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/lembaga kepada Kabupaten Lamongan diimplementasikan pada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah menurut kesesuaian tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yaitu meliputi:

1) DINAS PEDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Tugas pembantuan Pusat

Dasar pelaksanaannya :

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan antara lain :

- a. Keputusan Direktur sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2066/C4/KU.07.00/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Sekolah Menengah Pertama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022
- b. Berita Acara oleh Direktorat Sekolah dasar, Direktorat Jenderal pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 29701.83/C3/KPA/XII/BAST/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Peralatan Pendidikan Berbasis TIK Tahun anggaran 2022

Program :

1. Program Bantuan Pemerintah Sekolah Penerima Peralatan TIK SMP Tahun 2022
Program Bantuan Pemerintah Sekolah Penerima Peralatan TIK SMP Tahun 2022 ditargetkan 54 satuan pendidikan dengan jumlah anggaran Rp. 4.908.195.000,- (Empat milyar sembilan ratus delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
2. Program Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar
Program Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar ditargetkan 26 satuan pendidikan SD dengan anggaran sebesar Rp. 2.329.340.000,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

2) DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

Tugas pembantuan Pusat

Dasar pelaksanaannya :

1. DITJEN LINJAMSOS RI. Program PKH, PBI-N (Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), KSM)
2. Ditjen Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Program Pemberdayaan Sosial dan Kemiskinan)
3. DITJEN Penanganan Fakmis Kementerian Sosial RI (Program Pengentasan Kemiskinan Pedesaan dan Program Sembako)

Program dan Kegiatan :

- 1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Kegiatan Keluarga Harapan (PKH);
 - Kegiatan PBI JKN;
 - Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah.
- 2) Bidang Penanganan Fakmis
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - Kegiatan Bantuan Sembako;
- 3) Bidang Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial
 - Kegiatan Penyandang Disabilitas yaitu : ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan.
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial (LKS)
 - TKSK

3) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

Tugas pembantuan Provinsi

Dasar pelaksanaannya:

Surat Sekretaris Daerah Jawa Timur Nomor 140/14445/112.2/2022 Tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten pada P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Program :

Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan anggaran 1.055.450.000 yaitu untuk :

- 462 Kepala Desa dengan anggaran Rp. 138.600.000
- 462 Sekretaris Desa dengan anggaran Rp. 127.050.000
- 462 Kepala Urusan dengan anggaran Rp. 190.500.000
- 462 Kepala Seksi dengan anggaran Rp. 190.500.000
- 462 Kepala Kewilayahan/Dusun dengan anggaran Rp. 357.750.000
- 9 staf desa dengan anggaran Rp. 1.800.000

4) DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMONGAN

Tugas pembantuan Pusat

Selain melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD, Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan juga melaksanakan tugas pembantuan yang bersumber dari APBN. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kabupaten Lamongan di antaranya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan, dan Pembangunan Embung Pertanian, Optimalisasi Indeks Pertanaman, Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi

Tugas pembantuan pusat yang didapat Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah:

- a. Banpem ABT APBN Pusat
RJIT sebanyak 12 paket
- b. Peningkatan IP Padi
Bantuan benih padi 700.000 kg
- c. Peningkatan IP Jagung
Bantuan benih jagung 3375 kg
- d. Peningkatan IP Sorghum
Bantuan benih sorghum 2000 kg

Tugas pembantuan Provinsi

Tugas pembantuan provinsi yang didapat didapat Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah:

- 1) RJIT 10 paket
- 2) Irigasi Perpompaan 1 paket
- 3) Pembangunan Embung 2 pake

5) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN LAMONGAN

Tugas pembantuan Pusat

Dasar Pelaksanaan

- a. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
- b. Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor : 4481/HK.03/J.1/2022

Program :

Program KKBPK yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang KB sejumlah Rp. 2.346.325.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) sebesar Rp. 12.380.081.000,00

6) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

Tugas pembantuan Provinsi

Dasar Pelaksanaan dan Program

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan melakukan 8 tugas pembantuan, antara lain :

- a) Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri)
 - a. Perubahan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI No. 12624/KPTS/HK.160/F/10/2021 tentang petunjuk teknis kegiatan penyediaan benih dan bibit ternak serta peningkatan produksi ternak tahun Anggaran 2022
 - b. DIPA Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 No. SP DIPA-018.06.4.059181/2022 tanggal 17 November 2021

- b) Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/7090/122.3/2022 tentang Petugas/Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan dan Vaksinasi) dalam rangka Pengendalian dan Penanggulangan PMK di Jawa Timur Tahun 2022
 - b. Rekomendasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Korwil Jawa Timur Nomor 106 /C/PDHI-KORWIL-JATIM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022
 - c. Surat Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 8387/KPTS/PK.320/F/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan dalam rangka Pengendalian PMK
- c) Program Penandaan dan Pendataan Ternak
 - a. DIPA Satker Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Tahun 2022 revisi ke-7 Nomor: SP DIPA-018.06.4.059181/2022 tanggal 14 Juli 2022
- d) Program Belanja Bantuan Ternak untuk Kelompok Tani/Ternak, Kelompok Masyarakat di Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat untuk 4 kelompok di Kabupaten Lamongan
 - a. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2022 berupa Belanja Bantuan Ternak untuk Kelompok Tani/Ternak, Kelompok Masyarakat di Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat untuk 4 kelompok di Kabupaten Lamongan

- e) Kegiatan Bantuan Hibah Ternak Itik (Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak)
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6690/KPTS/PK.010/F/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2022
 - b. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana Pengadaan BPTU HPT Pelaihari Nomor 00139/Kpts/PL.130/F2.F/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Pengembangan unggas dan Aneka Ternak (Ternak Itik) Tahun Anggaran 2022
- f) Program *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Peternakan
 - a. DPA-OPD Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.08.0000/001/2022 tanggal 1 Januari 2022
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan bantuan Sosial
- g) Program Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
 - a. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*)
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku

- h) Kegiatan Pemeriksaan Antemortem Postmortem dan Status Reproduksi di RPH-R di Kabupaten Lamongan
- a. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/619/122.4/2022 tentang Petugas Pemeriksa Antemortem Postmortem dan Status Reproduksi di RPH-R di Jawa Timur Tahun 2022
 - b. DPA satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur TA 2022 Nomor: 914/245/203.2/2021 tanggal 31 Desember 2021

7) DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

Tugas pembantuan Pusat

Dasar pelaksanaan dan Program pelaksanaan tugas pembantuan:

Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor : PHD-058/IPDMIP/PK/2018 untuk *Intregrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program-* IPDMIP (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Parsipatif Terpadu).

Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Bidang Bina Penatagunaan Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan adalah :

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa bertujuan untuk peningkatan nilai dan keberlanjutan irigasi pertanian, guna tercapainya peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat pedesaan di Lamongan. Untuk mencapai tujuan ini, akan dilaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) melalui peningkatan sistem pengelolaan irigasi, penguatan P3A, penguatan Lembaga Pengelola Irigasi.

8) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN

Tugas Pembantuan Pusat

Dasar Pelaksanaan

Dalam tahun anggaran 2022 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mendapatkan mandat melaksanakan tugas

pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya No. 21/KPTS/DC/2022 tentang Penetapan Kabupaten dan Jumlah Lokasi Kegiatan Pamsimas Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2022.
- b. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 667/KPTS/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 347/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2022.
- c. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022 Tanggal 21 Februari 2022 Tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022
- d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 711/KPTS/M/2021 Tanggal 8 Juli 2022 Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Tahun Anggaran 2022
- e. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 667/KPTS/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 347/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2022

Program pelaksanaan tugas pembantuan:

1. PAMSIMAS

Program kolaborasi Pemerintah Pusat (Bappenas, PUPR, Kemenkes, Kemendagri dan Kemendes PDTT), Pemprov, Pemkab, Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk:

- 1) Meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan
- 2) Meningkatkan PHBS
- 3) Menurunkan Buang Air Sembarangan
- 4) Menurunkan Angka Penyakit
- 5) Mengarus-utamakan program penyediaan akses air minum dan sanitasi melalui partisipasi aktif masyarakat.

2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Program Kolaborasi Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Pemprov, Pemkab, Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk :

- 1) Meningkatkan akses sanitasi layak di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)
- 2) Menurunkan buang air sembarangan
- 3) Mengarus-utamakan program penyediaan akses sanitasi layak melalui partisipasi aktif masyarakat
- 4) Menurunkan angka penyakit
- 5) Mengurangi pencemaran lingkungan khususnya badan air
- 6) Meningkatkan kesadaran para penghuni LPK dan Masyarakat sekitar terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat
- 7) Menciptakan lingkungan belajar mengajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat
- 8) Menggerakkan perekonomian masyarakat setempat sehingga dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

9) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Tugas Pembantuan Provinsi

Dasar pelaksanaannya:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- b. Peraturan Presiden RI nomor 67 Tahun 2021 Tentang penanggulanagan penyakit Tuberkulosis;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 tahun 2022 tentang penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- d. Pedoman pelaksanaan kegiatan hibah global found komponen AIDS tahun 2022-2023 direktorat jenderal pencegahan dan penegendalian penyakit Kementrian kesehatan Republik Indonesia
- e. Surat Keputusan Menteri Kesehatan dengan Nomor HK.02.02/MENKES/295/2016 ;
- f. Grant confirmation IDN-H-MOH 2722 Indonesia HIV response : eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030 pada oktober 2021 antara Kementrian RI dan global Fund
- g. Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan provinsi jawa Timur sebagai Sub Recipient GF-ATM komponen Aids dengan Dinas Kesehatan Kabupaten lamongan sebagai Sub recipient GF-ATM komponen Aids dalam pelaksanaan proyek Indonesia HIV response :Eliminating the Aids Epidemic in Indonesia by 2030,Nomor :HK.03.01/C.1.2/442/2022

Program

a. Program Penanggulangan Tuberkolosis

Kegiatan :

Monitoring dan evaluasi,Supervisi,Distribusi obat,penemuan uspeck/kasus, penegakan diagnosa,croscek / follow up,dan Koordinasi lintas program / sektor

Sub Kegiatan :

Monitoring dan evaluasi,Supervisi,Distribusi obat,penemuan suspeck/kasus, penegakan diagnosa,croscek / follow up,dan Koordinasi lintas program / sector

b. program Pencegahan dan pengendalian penyakit menular HIV-AIDS

Kegiatan :

Akselerasi ARV di tingkat Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan :

Screeing HIV melakukan Mobile VCT serta BL

10) DINAS PU. BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN**Tugas Pembantuan Pusat****Dasar pelaksanaan**

- a. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2022 Tanggal 11 Januari 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran Tahun 2022;
- c. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

Program

Program Penyelenggaraan Jalan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan

- Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Sukodadi-Sumberwudi
- Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Laren-Blimbing

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Tugas pembantuan Pusat

Capain Kinerja pelaksanaan tugas pembantuan baik untuk satuan pendidikan SD maupun SMP tercapai 100%. Program bantuan pemerintah untuk Sekolah Penerima Pelaralatan TIK tahun anggaran 2022 SMP dengan target 54 terlaksana sebanyak 54 satuan pendidikan SMP di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 2 SMP Negeri dan 52 SMP Swasta, dengan jumlah anggaran Rp. 4.908.195.000,- (Empat milyar sembilan ratus delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sedangkan program Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah dasar dengan target 26 terlaksana sebanyak 26 satuan pendidikan SD dengan anggaran sebesar Rp. 2.329.340.000,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

2) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tugas pembantuan Pusat

a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Kegiatan Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 44.668 KPM dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Rp. 34.229.525.000.
2. Kegiatan PBI JKN dengan dana APBN sebanyak dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Rp. 27.573.570.000
3. Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah untuk korban bencana banjir sebanyak 8.638 jiwa atau 17.276 ton dengan dana APBN.

b. Bidang Penanganan Fakmis

Kegiatan penerima bantuan Sembako dengan dana APBN (BPNT/ SEMBAKO) sebanyak 94.6263 KPM, dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Rp. 294.090.200.000. Adapun dana bantuan dipergunakan untuk masyarakat miskin.

Tugas pembantuan Provinsi

a. Bidang Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Penyandang Disabilitas sumber dana APBD PROV :

- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan Plus Tahap di 14 Kecamatan (Laren, Brondong, Maduran, Paciran, Sukodadi, Babat, Kedungpring, Glagah, Karangbinangun, Kalitengah, Karanggeneng, Solokuro, Bluluk, Deket) dengan target 76 orang dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Rp. 68.400.000

- Top UP bagi penerima ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan di 14 Kecamatan (Laren, Brondong, Maduran, Paciran, Sukodadi, Babat, Kedungpring, Glagah, Karangbinangun, Kalitengah, Karanggeneng, Solokuro, Bluluk, Deket) dengan target 26 orang dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Rp. 22.800.000
- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan Plus Tahap di 27 Kecamatan dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Rp. 100.800.000
- Top UP bagi penerima ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan di 27 Kecamatan dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Rp. 33.600.000

b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3.919 KPM dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Rp. 1.959.500.000
- Kegiatan PBI JKN sebanyak 19.566 dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Rp. 880.470.000

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

- Kegiatan TKSK, bantuan pada operasionalnya TKSK sebanyak 27 orang dengan Dana Dekon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.000.000,- terealisasi sebesar Rp.81.000.000,- atau 100%.

3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Tugas pembantuan Provinsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten lamongan melaksanakan Tugas pembantuan provinsi yaitu Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan anggaran Rp. 1.055.450.000, teralisasi Rp. 986.825.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- 462 Kepala Desa dengan anggaran Rp. 138.600.000
- 462 Sekretaris Desa dengan anggaran Rp. 127.050.000
- 462 Kepala Urusan dengan anggaran Rp. 190.500.000
- 462 Kepala Seksi dengan anggaran Rp. 190.500.000
- 462 Kepala Kewilayahan/Dusun dengan anggran Rp. 357.750.000
- 9 staf desa dengan anggran Rp. 1.800.000

4) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

Tugas pembantuan Pusat

Capaian kinerja tugas pembantuan Pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- 1) Banpem ABT APBN Pusat
RJIT sebanyak 12 paket
- 2) Peningkatan IP Padi
Bantuan benih padi 700.000 kg
- 3) Peningkatan IP Jagung
Bantuan benih jagung 3375 kg
- 4) Peningkatan IP Sorghum
Bantuan benih sorghum 2000 kg

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pembantuan dengan realisasi kinerja 100% atau telah terlaksana seluruhnya.

Tugas pembantuan Provinsi

Tugas pembantuan provinsi yang didapat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah:

- a. RJIT 10 paket
- b. Irigasi Perpompaan 1 paket
- c. Pembangunan Embung 2 paket

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pembantuan dengan realisasi kinerja 100% atau telah terlaksana seluruhnya.

5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Provinsi

Anggaran yang telah dialokasikan untuk Tugas Pembantuan telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan terealisasi sebesar Rp. 10.004.237.200,00 atau 80,81% (Sumber Anggaran BOKB) dan Rp. 2.308.298.546,00 atau 98,38% (Sumber Anggaran DAK Fisik). Adapun rincian kegiatan untuk pemenuhan target sesuai dengan perjanjian bersama program KKBPK adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana, yang berisi kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan:
 - a) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja telah terealisasi sebesar Rp. 4.375.000,00 dari anggaran Rp. 4.375.000,00.
 - b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal telah terealisasi sebesar Rp. 24.997.200,00 dari anggaran Rp. 25.000.000,00
 - c) Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang telah terealisasi sebesar Rp.70.619.650,00 dari anggaran Rp. 70.640.000,00
 - d) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) telah terealisais sebesar Rp.375.265.800,00 dari anggaran Rp. 421.200.000,00
 - e) Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK telah terealisasi sebesar Rp. 1.002.726.771,00 dari anggaran Rp. 1.093.500.000,00
 - f) Pengendalian Program KKBPK telah terealisasi sebesar Rp. 36.800.000,00 dari anggaran Rp. 40.000.000,00
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan sub kegiatan:
 - a) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) telah terealisais sebesar Rp. 2.272.683.000,00 dengan anggaran Rp. 2.275.200.000,00.
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya telah terealisasi sebesar Rp. 26.480.000,00 dari anggaran Rp.26.550.000,00
 - b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) telah terealisais Rp. 710.858.400,00 dari anggaran Rp. 773.121.000,00.

- c) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik) telah teralisasi sebesar Rp. 1.992.298.746,00 dari anggaran Rp. 2.016.325.000,00.
 - d) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya telah teralisasi sebesar Rp. 21.000.000,00 dari anggaran Rp. 21.000.000,00.
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan sub kegiatan:
- a) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB telah terealisasi Rp. 1.683.180.500,00 dari anggaran Rp.1.845.750.000,00.

6) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Provinsi

1. Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri)
Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 2.016.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.590.690.000,00 (78,90%).
2. Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi
Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 2.565.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.715.875.000 (66,90%).
3. Program Penandaan dan Pendataan Ternak
Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 882.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 573.340.000,00 (65%)
4. Program Belanja Bantuan Ternak untuk Kelompok Tani/Ternak, Kelompok Masyarakat di Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat untuk 4 kelompok di Kabupaten Lamongan
Program dan Kegiatan bersumber dari DPPA PAPBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sudah terealisasi 100%
5. Bantuan Hibah Ternak Itik (Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak)

Program dan Kegiatan bersumber dari APBN Satker Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI sudah terealisasi 100%.

6. Program *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Peternakan
APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Satker Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur sudah terealisasi 100%.
7. Program Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
APBN Kementerian Pertanian RI satker Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 belum realisasi.
8. Kegiatan Pemeriksaan Antemortem Postmortem dan Status Reproduksi di RPH-R di Kabupaten Lamongan
APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Satker Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur sudah terealisasi 100%.

7) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Bidang Bina Penatagunaan Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan adalah :

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa bertujuan untuk peningkatan nilai dan keberlanjutan irigasi pertanian, guna tercapainya peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat pedesaan di Lamongan. Untuk mencapai tujuan ini, akan dilaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) melalui peningkatan sistem pengelolaan irigasi, penguatan P3A, penguatan Lembaga Pengelola Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas PU. Sumber Daya Air pada tahun 2022 yang bersumber dari bantuan dana hibah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.122.868.895,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.010.950.386,00 atau 98,17%.

8) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

1. PAMSIMAS

Kegiatan Pamsimas di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2022 fokus ke Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi 100%. Terdapat 5 desa dan pengguna air minum bertambah sebanyak 579 SR.
2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan
Kegiatan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2022 fokus pada penanganan air limbah/sanitasi pada lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- dan terealisasi 100%. Terdapat 3 Lembaga Pendidikan Keagamaan penerima program ini.
 3. Program BSPS
Kegiatan Program BSPS di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2022 fokus pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting dengan anggaran sebesar Rp. 13.400.000.000,- dan terealisasi 100%. Terdapat 756 unit penerima program ini.
 4. Program KOTAKU
Kegiatan Program KOTAKU di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2022 fokus pada Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dan terealisasi 100%.
Terdapat 13,01 Ha Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)program ini.

9) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Provinsi

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2022, pada penanggulangan Tuberculosis (TB Paru) melalui kegiatan Monitoring dan evaluasi,Supervisi,Distribusi obat,penemuan suspek/kasus, penegakan diagnosa,croscek / follow up,dan Koordinasi lintas program / sector dari dana bantuan keuangan hibah global found anggaran Rp.927.583.058 terealisasi sebesar Rp.927.583.058 atau 100%.serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular HIV/AIDS melalui kegiatan Akselerasi ARV di tingkat Kabupaten /Kota dengan Screning HIV melakukan mobile VCT serta BL yang sudah di atur dalam work plane propinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran bantuan keuangan hibah global found sebesar Rp.194.091.850 dan terealisasi sebesar Rp.167.469 atau 86,28%.

10) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

Tugas Pembantuan Pusat

1. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Sukodadi-Sumberwudi
 - a. Target Anggaran : Rp. 4.800.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 3.840.000.000
 - b. Target Fisik : 1,2 Km
Realisasi Fisik : 1,2 Km
Realisasi Prosentase : 100 %
2. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Laren-Blimbing
 - a. Target Anggaran : Rp. 4.850.000.000
Realisasi Anggaran : Rp. 3.973.108.000
 - b. Target Fisik : 1,5 Km
Realisasi Fisik : 1,5 Km
Realisasi Prosentase : 100 %

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.1.1. Target Kinerja

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Target kinerja yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek atas pelaksanaan penugasan pembantuan untuk Program bantuan Pemerintah Sekolah penerima peralatan TIK SMP tahun 2022 ditargetkan 54 satuan pendidikan dengan jumlah anggaran Rp. 4.908.195.000,- (Empat milyar sembilan ratus delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sedangkan program Bantuan Peralatan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah dasar ditargetkan 26 satuan pendidikan SD dengan anggaran sebesar Rp. 2.329.340.000,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

b. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Kegiatan Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 44.668 KPM dengan alokasi anggaran Rp. 34.229.525.000.

- Kegiatan PBI JKN dengan dana APBN sebanyak dengan alokasi anggaran Rp. 27.573.570.000
 - Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah untuk korban bencana banjir sebanyak 8.638 jiwa atau 17.276 ton dengan dana APBN
2. Bidang Penanganan Fakmis
- Kegiatan penerima bantuan Sembako dengan dana APBN (BPNT/ SEMBAKO) sebanyak 94.6263 KPM, dengan alokasi anggaran Rp. 294.090.200.000. Adapun dana bantuan dipergunakan untuk masyarakat miskin.

c. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

Target kinerja tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah:

- 1) Banpem ABT APBN Pusat
RJIT sebanyak 12 paket
- 2) Peningkatan IP Padi
Bantuan benih padi 700.000 kg
- 3) Peningkatan IP Jagung
Bantuan benih jagung 3375 kg
- 4) Peningkatan IP Sorghum
Bantuan benih sorghum 2000 kg

d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Tugas Pembantuan yang didukung oleh anggaran dari Dana Transfer ke Daerah untuk Program KKBPK yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang KB sejumlah Rp. 2.346.325.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) sebesar Rp. 12.380.081.000,00 yang selanjutnya diwujudkan ke dalam program dan kegiatan seperti :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana, yang berisi kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan:
 - a) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja dengan anggaran Rp. 4.375.000,00

- b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan anggaran Rp. 25.000.000,00 serta mempunyai target 1 video sebagai media KIE.
 - c) Promosi dan KIE Program KKBPk melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang dengan anggaran Rp. 70.640.000,00 serta mempunyai target 3700 lembar media cetak dan KIE elektronik yaitu 3 iklan.
 - d) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan anggaran Rp. 421.200.000,00 serta mempunyai target melaksanakan kegiatan minilok di 27 Balai Penyuluhan.
 - e) Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPk dengan anggaran Rp. 1.093.500.000,00 serta mempunyai target 27 balai penyuluhan kb yang terpelihara sesuai ketentuan
 - f) Pengendalian Program KKBPk dengan anggaran Rp. 40.000.000,00 untuk target pelaksanaan audit kasus stunting sebanyak 2 kali
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan sub kegiatan:
- a) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan anggaran Rp. 2.275.200.000,00 dengan target jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan penyuluhan sebanyak 4195 orang.
- c. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
- a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan anggaran Rp.26.550.000,00 serta mempunyai target jumlah Faskes KB yang menerima Alkon sebanyak 59.
 - b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan anggaran Rp. 773.121.000,00 serta mempunyai target yaitu 1350 akseptor implant yang terlayani, 470 akseptor IUD yang

- terlayani, 9 Akseptor MOP yang terlayani, dan 129 Akseptor MOW yang terlayani.
- c) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik) dengan anggaran Rp. 2.016.325.000,00 serta mempunyai target yaitu 15 Balai penyuluhan KB yang direhab, 15 Unit Kendaraan roda dua pengantar akseptor yang tersedia dengan baik, serta 1 jumlah gudang alokon yang diperbaiki.
 - d) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya dengan anggaran Rp. 21.000.000,00 dengan target 28 Faskes KB yang dimonotoring.
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan sub kegiatan:
- a) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan anggaran Rp.1.845.750.000,00 serta mempunyai target jumlah kecamatan yang mendapat dukungan Program KKBPK di Kampung KB sebanyak 27 Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), yang berisi kegiatan:
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) dengan anggaran Rp. 330.000.000,00 serta mempunyai target yaitu 10 paket BKB Kit Stunting dan 10 Paket Kit Siap Nikah Anti Stunting.
 - b) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan anggaran Rp.5.557.520.000,00 dan mempunyai target Jumlah anggota tim pendamping stunting sebanyak 3108 orang, jumlah catin yang didampingi 10056 orang, jumlah ibu hamil yang didampingi 16268

Orang, jumlah ibu pascasalin yang didampingi 16268 orang.

c) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) telah dengan anggaran Rp. 95.530.000,00 serta mempunyai target jumlah peserta SOTH adalah 300 peserta

b. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)

a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) dengan anggaran Rp. 30.000.000,00 serta mempunyai target jumlah ATTG yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 3 paket serta jumlah peserta Pembinaan puyangatra sebanyak 80 peserta

e. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Program dan Kegiatan yang bersumber dari Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 6.122.868.895,00. Target bantuan anggaran digunakan untuk Kegiatan Fasilitas OP dan Perencanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi (RP2I)

f. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

1. PAMSIMAS

Target program padat karya Pamsimas pada tahun anggaran 2022 ditargetkan untuk 5 desa, yaitu :

- 1) Banjarwati Kecamatan Paciran
- 2) Bulubrangsi Kecamatan Laren
- 3) Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng
- 4) Jubelkidul Kecamatan Sugio
- 5) Sumberdadi Kecamatan Mantup

2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan tahun anggaran 2022 ditergetkan untuk 3 LPK, yaitu :

- 1) PP. Muhammadiyah Al Manar Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong
- 2) Yayasan Fathul Hidayah Desa Pangean Kecamatan Maduran
- 3) Ponpes Mambaul Ulum Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun

3. Program BSPS

Program BSPS tahun anggaran 2022 ditergetkan, yaitu :

a. BSPS Tahap III

- Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan
- Desa Gondanglor Kecamatan Sugio
- Desa Deketagung Kecamatan Sugio
- Desa Karangsambigalih Kecamatan Sugio\
- Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang
- Desa Kakatpenjalin Kecamatan Ngimbang

b. BSPS Tahap IX

- Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang
- Desa Kakatpenjalin Kecamatan Ngimbang

c. BSPS Tahap III PKE

- Desa Sukorame Kecamatan Sukorame
- Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame
- Desa Kedungrejo Kecamatan Sukorame
- Desa Sembung Kecamatan Sukorame
- Desa Sidodowo Kecamatan Modo
- Desa Sidomulyo Kecamatan Modo

d. BSPS Tahap IV PKE

- Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame
- Desa Sukorame Kecamatan Sukorame

e. BSPS Tahap VI PKE

- Desa Kedungrejo Kecamatan Sukorame

4. Program KOTAKU

Program KOTAKU tahun anggaran 2022 ditergetkan, yaitu :
Desa Sidomukti

g. Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

1. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Sukodadi-Sumberwudi
 - Target Anggaran : Rp. 4.800.000.000
 - Target Fisik : 1,2 Km
2. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Laren-Blimbing
 - Target Anggaran : Rp. 4.850.000.000
 - Target Fisik : 1,5 Km

3.1.2. Realisasi

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.1
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) (12)
1.	Kemendikbud ristek RI	Berita Acara Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek RI Nomor : 29701.83/C3/KPA/XIIBAST//2022 Tgl. 15 Desember 2022.	Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat peralatan pendidikan berbasis TIK.	26 SD Negeri/ Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan	2,329,340,000.	2,329,340,000.	100		100
2.	Kemendikbud ristek RI	Kepetusan Direktur SMP Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek RI Nomor : 2066/C4/KU.07.00/2022 Tanggal 27 September 2022.	Penerima bantuan Pemerintah Peralatan TIK SMP Direktorat SMP Tahun Anggaran 2022.	54 SMP Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan	4.908.195.000	4.908.195.000	100		100

b. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.2
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Tahap	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Kemensos	Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Keluaran(Output): terlaksananya bantuan uang non tunai pada komponen KPM PKH di Kab.Lamongan	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan	Tahap 1	36,692,050,000	36,525,825,000	100%	36,525,825,000	100%	
						Tahap 2	35,547,450,000	35,401,150,000	100%	35,401,150,000	100%	
						Tahap 3	34,353,575,000	34,229,525,000	100%	34,229,525,000	100%	
						Tahap 4	34,353,575,000	34,229,525,000	100%	34,229,525,000	100%	

			Rincian Kegiatan: pemberian bantuan uang non tunai ke KPM PKH									
2	Kemensos	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota Keluaran(Output): terlaksananya pendataan JKN Kab.Lamongan Rincian Kegiatan: melakukan verval JKN	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan	APBN	27.573.570.000	27.573.570.000	100%	27.573.570.000	100%	
3	Kemensos	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme	Program: Penanganan Bencana Kegiatan: Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan		17.276 ton	17.276 ton	100%	17.276 ton	100%	

		Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat	Sub Kegiatan: Penyediaan permakanaan Keluaran(Output): terlaksananya pemberian bantuan beras pada korban bencana di Kab. Lamongan Rincian Kegiatan: pemberian bantuan beras pada korban bencana									
4	Kemensos	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan kabupaten/kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat Keluaran(Output): terlaksananya pemberian bantuan sembako bagi masyarakat miskin di Kab.Lamongan Rincian Kegiatan:	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan	JANUARI	17.296.600.000	17.296.600.000	100%	17.296.600.000	100%	
						FEBRUARI	17.296.600.000	17.296.600.000	100%	17.296.600.000	100%	
						MARET	17.296.600.000	17.296.600.000	100%	17.296.600.000	100%	
						APRIL	15.371.000.000	15.371.000.000	100%	15.371.000.000	100%	
						MEI	17.600.200.000	17.600.200.000	100%	17.600.200.000	100%	

			pemberian sembako		MINYAK GORENG	26.400.300.000	26.400.300.000	100%	26.400.300.000	100%	
					JUNI	16.395.000.000	16.395.000.000	100%	16.395.000.000	100%	
					JULI	16.395.000.000	16.395.000.000	100%	16.395.000.000	100%	
					AGUSTUS	16.403.600.000	16.403.600.000	100%	16.403.600.000	100%	
					SEPTEMBER + BLT BBM	47.818.500.000	47.818.500.000	100%	47.818.500.000	100%	
					OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER + BLT BBM	85.816.800.000	85.816.800.000	100%	85.816.800.000	100%	

c. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.5

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	SKPD Pelaksana	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Capaian Kegiatan (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sarana Prasarana Pertanian	1. SP DIPA-018.08.4.059185/2021 tanggal 17 November 2021 2. SK No. 188/167/413.119/2022 tentang Penunjukkan Calon Petani Calon Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan Menengah, dan Embung Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 3. SK No. 188/196/Kep/413.119/2022 tentang Penetapan KelompokPenerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan Menengah, dan Pembangunan Embung Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (RJIT)	Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10 paket rehab jaringan irigasi	10 paket rehab jaringan irigasi	100%	
	Sarana Prasarana	1. SP DIPA-018.08.4.059185/2021 tanggal 17 November 2021	Pengelolaan Air Irigasi untuk	Lamongan	Dinas Ketahanan	2 paket pembangun	2 paket pembangun	100%	

	Pertanian	<p>2. SK No. 188/167/413.119/2022 tentang Penunjukkan Calon Petani Calon Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan Menengah, dan Embung Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022</p> <p>SK No. 188/196/Kep/413.119/2022 tentang Penetapan KelompokPenerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan Menengah, dan Pembangunan Embung Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan</p>	Pertanian (Pembangunan Embung Pertanian)		Pangan dan Pertanian	an embung	an embung		
	Sarana Prasarana Pertanian	<p>1. SP DIPA-018.08.4.059185/2021 tanggal 17 November 2021</p> <p>2. SK No. 188/167/413.119/2022 tentang Penunjukkan Calon Petani Calon Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan Menengah, dan Embung Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022</p> <p>3. SK No. 188/196/Kep/413.119/2022 tentang Penetapan KelompokPenerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan Menengah, dan Pembangunan Embung Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan</p>	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (Irigasi Perpompaan)	Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 paket irigasi perpompaa n	1 paket irigasi perpompaa n	100%	

d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.6
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KE T.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor: 4481/HK.03/J1/2022	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Lamongan	Dinas PPKB	4.375.000,00	4.375.000,00	100%			
			Rincian Kegiatan :								
			Pelaksanaan advokasi kepada Stakeholder atau mitra kerja								
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Lamongan	Dinas PPKB	25.000.000	24.997.200	99,99%	27 Balai Penyuluhan KB		
			Keluaran :								

		Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dukungan Media KIE							
		Rincian Kegiatan :							
		Pembuatan Video							
		Promosi dan KIE Program KKBP melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Lamongan	Dinas PPKB	70.640.000	70.619.650	99,97%	3700 lembar media cetak; dan 3 iklan elektronik	
		Keluaran :							
		Jumlah Media KIE Cetak; Jumlah Media KIE Elektronik							
		Rincian Kegiatan :							
		Melaksanakan pencetakan media KIE serta pembuatan media KIE Elektronik							
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Lamongan	Dinas PPKB	421.200.000	375.265.800	89,09%	27 Balai Penyuluhan KB	
		Keluaran :							
		Jumlah Balai Penyuluhan KB yang melaksanakan kegiatan minilok							
		Rincian Kegiatan :							
		Kegiatan penyuluhan (mini lokarya)							

		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Lamongan	Dinas PPKB	1.093.500.000	1.002.726.771	91,70%	27 Balai Penyuluhan KB		
		Keluaran :								
		Jumlah Peserta Orientasi Tenaga Lini Lapangan, Pembinaan Kader IMP, dan Penyuluhan KB								
		Rincian Kegiatan :								
		Sosialisasi orientasi tenaga lini lapangan, pembinaan kader IMP serta penyuluhan KB								
		Pengendalian Program KKBP	Lamongan	Dinas PPKB	40.000.000	36.800.000	92,00%	27 Balai Penyuluhan KB		
		Keluaran :								
		Jumlah pelaksanaan audit kasus stunting								
		Rincian Kegiatan :								
		Pelaksanaan audit kasus stunting								
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Lamongan	Dinas PPKB	2.275.200.000	2.272.683.000	99,89%			
		Keluaran :								
		Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan penyuluhan								

		Rincian Kegiatan :							
		Penyuluhan yang dilakukan oleh PPKBD dan sub PPKBD							
		Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Lamo ngan	Dinas PPKB	26.550.000	26.480.000	99,74%		
		Keluaran :							
		Jumlah Faskes KB yang menerima Alkon							
		Rincian Kegiatan :							
		Faskes Pelayanan KB							
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Lamo ngan	Dinas PPKB	773.121.000	710.858.400	91,95%		
		Keluaran :							
		Jumlah Akseptor Implant yang terlayani, Jumlah Akseptor IUD yang terlayani, dan Jumlah Akseptor MOP yang terlayani							
		Rincian Kegiatan :							

			Pelayanan Medis						
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik)	Lamongan	Dinas PPKB	2.016.325.000	1.992.298.746	98,81%	15 Balai penyuluhan KB yang direhab, 15 Unit Kendaraan roda dua pengantar akseptor yang tersedia dengan baik, serta 1 jumlah gudang alokon yang diperbaiki
			Keluaran :						
			Jumlah Gedung Kantor dan Fasilitas Pendukung yang direhab; Jumlah Kendaraan Roda Dua Pengantar Akseptor yang tersedia dengan baik, Jumlah sarana dan prasarana gudang Alokon yang diadakan; Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan KB yang tersedia						
			Rincian Kegiatan :						

		Rehab Balai Penyuluhan KB, Pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Pengantar Akseptor, Pengadaan Sarana Prasarana Gudang Alokon dan Sarana Prasarana Pelayanan KB							
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Lamo ngan	Dinas PPKB	21.000.000	21.000.000	100%		
		Keluaran :							
		Jumlah faskes KB yang di monitoring							
		Rincian Kegiatan :							
		terdapat 28 Faskes KB yang dimonotoring							
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Lamo ngan	Dinas PPKB	1.845.750.000	1.683.180.500	91,19%		
		Keluaran :							

		Jumlah Peserta Kegiatan Tribina; Jumlah Peserta Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lapangan di Kampung KB; Jumlah Peserta Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB							
		Rincian Kegiatan :							
		Kegiatan Pertemuan di Kampung KB							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS),							
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Lamo ngan	Dinas PPKB	95.530.000	95.530.000	100%	Kegiatan SOTH	10 0%
		Keluaran :							
		Jumlah Peserta Sekolah Orang Tua Hebat							
		Rincian Kegiatan :							
		Kegiatan Wisuda SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat)							

			Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Lamongan	Dinas PPKB	30.000.000	29.690.541	98,97%	Hibah ATTG sebanyak 3 Paket dan Kegiatan Pusyongatra	100%
			Keluaran :							
			Jumlah ATTG yang diberikan pada masyarakat; Jumlah Peserta Pembinaan Pusyongatra							
			Rincian Kegiatan :							
			Pengadaan Hibah ATTG dan Kegiatan Pusyongatra							

e. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.8
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas PU. Sumber Daya Air
Kabupaten Lamongan

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	KAB/ KOTA	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Pengembangan Sumber Daya Air	Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor : PHD-	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Keluaran (output) Jumlah kegiatan pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipatif secara terpadu	Kab. Lamongan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	6.122.868.895	6.010.950.386	98,17	Tewujudnya kegiatan fasilitasi OP dan Perencanaan Pengelolaan Lahan Pertanian	100	

		<p>058/IPDMIP/PK/2018 untuk Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program-IPDMIP (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Parsipatif Terpadu)</p>	<p>Rincian Kegiatan IPDMIP :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa ▪ Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ▪ Pemeliharaan Pintu Air 15 Daerah Irigasi ▪ Pengadaan Fasilitas Operasi dan Pemeliharaan 15 Daerah Irigasi ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Karangturi) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Konang) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi PA. Karanggeneng (Rehabilitasi Saluran Sekunder Somosari) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bulu (Rehabilitasi Saluran Sekunder Bulutengger) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bulu (Rehabilitasi 					<p>Beririgasi (RP2I)</p>		
--	--	--	---	--	--	--	--	--------------------------	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> Saluran Sekunder Siman) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon (Rehabilitasi Saluran Sekunder Banjarmadu) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon (Rehabilitasi Saluran Sekunder Madulegi) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Sluis Keyongan (Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebonagung) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Sluis Keyongan (Rehabilitasi Saluran Sekunder Tritunggal) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Bowo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Kedungwaras) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Bowo (Rehabilitasi Saluran Sekunder Sidodowo) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling (Rehabilitasi Saluran Sekunder Bakalrejo) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling (Rehabilitasi Saluran Sekunder Kedungbanjar) 							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Canggah (Rehabilitasi Saluran Sekunder Pandanpancur) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Delikguno (Rehabilitasi Saluran Sekunder Jatierejo) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Delikguno (Rehabilitasi Saluran Sekunder Pengumbulanadi) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Jajong (Rehabilitasi Saluran Sekunder Godog) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Maduran (Rehabilitasi Saluran Sekunder Maduran) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Makamsantri (Rehabilitasi Saluran Sekunder Tamanprijeg) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan (Rehabilitasi Saluran Sekunder Palangan) ▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Takeran (Rehabilitasi Saluran Sekunder Bakalan) 							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Takeran (Rehabilitasi Saluran Sekunder Dukuhagung)▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Tuwiri (Rehabilitasi Saluran Sekunder Deket Kulon)▪ Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Tuwiri (Rehabilitasi Saluran Sekunder Tambakboyo)								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.9
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Dirjen Cipta Karya No. 21/KPTS/DC/2022 tentang Penetapan Kabupaten dan Jumlah Lokaso Kegiatan Pamsimas Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PAMSIMAS Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Desa Jubelkidul Kecamatan Sugio Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan	2.000.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000	2.000.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000	100%	419 KK 80 SR 35 SR 123 SR 21 SR 160 SR	100%	

										PROGRAM SANITASI LPK	
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 667/KPTS/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 347/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infarstruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2022	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PP. Muhammadiyah Al Manar Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan	600.000.000	600.000.000	100%	150 KK	100%	
						200.000.000	200.000.000		50 KK		
				Yayasan Fathul Hidayah Desa Pangean Kecamatan Maduran		200.000.000	200.000.000		50 KK		
			Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ponpes Mambaul Ulum Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun		200.000.000	200.000.000		50 KK		

3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022 Tanggal 21 Februari 2022 Tentang Besaran Nilai Dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor	PROGRAM BSPTS							
			Program : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan	13.320.000.000	13.320.000.000	100%	666 UNIT	100%
			Kegiatan : Pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas.	Sidoarjo – lamongan		420.000.000	420.000.000		21	
				kakatpenjalin – ngimbang		640.000.000	640.000.000		32	
				Slaharwotan – Ngimbang		480.000.000	480.000.000		24	
				Gondanglor – sugio		940.000.000	940.000.000		47	
				Deketagung – sugio		920.000.000	920.000.000		46	
				karangsambigalih – sugio		520.000.000	520.000.000		26	
				Sidodowo		260.000.000	260.000.000		13	
				Sidomulyo		280.000.000	280.000.000		14	
				Sukorame		460.000.000	460.000.000		23	
				Sembung		380.000.000	380.000.000		19	
				Kedungrejo		140.000.000	140.000.000		7	
	Kedungkupul		460.000.000	460.000.000		23				
	Sukorame		2.200.000.000	2.200.000.000		110				

		711/KPTS/M/2021 Tanggal 8 Juli 2022 Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Tahun Anggaran 2022		Kedungkumpul		5.220.000.000	5.220.000.000		261		
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 667/KPTS/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan	PROGRAM KOTAKU								
			Program : Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Desa Sidomukti	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan	750.000.000	750.000.000	100%	13,01 Ha	100%	
			Kegiatan : Infrastruktur Berbasis Masyarakat			750.000.000	750.000.000		13,01 Ha		

	Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 347/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2022									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1.2.10
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pu. Bina Marga Kabupaten Lamongan

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<p>1 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2022 Tanggal 11 Januari 2022, Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022</p> <p>2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum</p>	<p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota</p> <p>1 Keluaran (Output) : CBC 1200 M</p> <p>Rincian Kegiatan : Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Sukodadi-Sumberwudi</p>	Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Kalitengah	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	4.800.000.000	3.840.000.000	100	CBC 1200 M	100	

		dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran Tahun 2022								
	3	Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022	2	Keluaran (Output) : CBC 1200 M Rincian Kegiatan : Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Laren-Blimbing	Kecamatan Laren	4.850.000.000	3.973.108.000	100	CBC 1200 M	100

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota

3.2.1. Target Kinerja

a. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1) Bidang Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Penyandang Disabilitas sumber dana APBD PROV :

- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan Plus Tahap di 14 Kecamatan (Laren, Brondong, Maduran, Paciran, Sukodadi, Babat, Kedungpring, Glagah, Karangbinangun, Kalitengah, Karanggeneng, Solokuro, Bluluk, Deket) dengan target 76 orang dengan alokasi anggaran Rp. 68.400.000
- Top UP bagi penerima ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan di 14 Kecamatan (Laren, Brondong, Maduran, Paciran, Sukodadi, Babat, Kedungpring, Glagah, Karangbinangun, Kalitengah, Karanggeneng, Solokuro, Bluluk, Deket) dengan target 26 orang dengan alokasi anggaran Rp.22.800.000
- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan Plus Tahap di 27 Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp. 100.800.000
- Top UP bagi penerima ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan di 27 Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp.33.600.000

2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3.919 KPM dengan alokasi anggaran Rp. 1.959.500.000
- Kegiatan PBI JKN sebanyak 19.566 dengan alokasi anggaran Rp. 880.470.000

3) Bidang Pemberdayaan Sosial

Kegiatan TKSK, bantuan pada operasionalnya TKSK sebanyak 27 orang dengan Dana Dekon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.000.000,- terealisasi sebesar Rp.81.000.000,- atau 100%.

b. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

Target kinerja tugas pembantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan, dan Pembangunan Embung Pertanian adalah:

- 1) RJIT 10 paket
- 2) Irigasi Perpompaan 1 paket
- 3) Pembangunan Embung 2 paket.

c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Target Kinerja Tugas Pembantuan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan :

- 1) Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri)

Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 2.016.000.000,00. Target bantuan anggaran digunakan untuk Dana Operasional petugas IB guna mendukung percepatan peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau.

- 2) Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi

Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 2.565.000.000. Target bantuan anggaran digunakan untuk Dana Operasional petugas vaksinasi guna mendukung percepatan vaksinasi PMK pada ternak sapi, kerbau, kambing dan domba.

- 3) Program Penandaan dan Pendataan Ternak

Program dan Kegiatan yang bersumber dari TP-APBN Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran total sebesar Rp. 882.000.000,00. Target bantuan anggaran digunakan untuk Dana Operasional petugas penandaan guna mendukung percepatan penandaan pada ternak sapi dan kerbau.

- 4) Program Belanja Bantuan Ternak untuk Kelompok Tani/Ternak, Kelompok Masyarakat di Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat untuk 4 kelompok di Kabupaten Lamongan

Program dan Kegiatan bersumber dari DPPA PAPBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2022. Target bantuan anggaran digunakan untuk hibah ternak pada Pokmas Berkah Akar Rumput desa Payaman solokuro, Pokmas Muda Karya desa Solokuro, Pokmas Peternak Muda Lamongan desa Solokuro dan Pokmas Karya mandiri desa jatirenggo kec. Glagah.

- 5) Bantuan Hibah Ternak Itik (Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak)

Program dan Kegiatan bersumber dari APBN Satker Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI untuk hibah ternak pada Kelompok Sumber Rejeki desa Tawangrejo, Kelompok Tunggal Jaya Desa Kemplagigede, Kelompok Raharjo Desa Plososetro desa Plososetro dan Kelompok Mulia Desa Turi.

- 6) Program *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Peternakan APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Satker Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur untuk hibah ternak pada Kelompok Ternak Sumber Rezeki desa Mantup Kec. Mantup

- 7) Program Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) APBN Kementerian Pertanian RI satker Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 untuk kompensasi ganti uang pada ternak yang mati/potong bersarat akibat penyakit PMK.

- 8) Kegiatan Pemeriksaan Antemortem Postmortem dan Status Reproduksi di RPH-R di Kabupaten Lamongan

APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Satker Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur untuk bantuan operasional petugas pemeriksa antemortem dan posmortem.

d. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Target kinerja yang sudah ditetapkan melalui kegiatan penanggulangan Tuberculosis (TB Paru) dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV – AIDS.

Program dan kegiatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2022, pada penanggulangan Tuberculosis (TB Paru) melalui kegiatan Monitoring dan evaluasi, Supervisi, Distribusi obat, penemuan suspek/kasus, penegakan diagnosa, croscek / follow up, dan Koordinasi lintas program / sector dari dana bantuan keuangan hibah global fund dengan anggaran Rp.927.583.058 serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular HIV/AIDS melalui kegiatan Akselerasi ARV di tingkat Kabupaten /Kota dengan Screening HIV melakukan mobile VCT serta BL yang sudah di atur dalam work plane propinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran bantuan keuangan hibah global fund sebesar Rp.194.091.850.

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 140/14455/112.2/2022 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten pada P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 1.055.450.000,- sebagai berikut:

- Kepala Desa Jumlah 462 (Rp. 300.000) : Rp. 136.600.000
- Sekretaris Desa Jumlah 462 (Rp. 275.000) : Rp. 127.050.000
- Kepala Urusan Jumlah 762 (Rp. 250.000) : Rp. 190.500.000
- Kepala Seksi Jumlah 762 (Rp. 250.000) : Rp. 190.500.000
- Kepala Kewilayahan / Dusun (Rp. 250.000) : Rp. 357.750.000
- Staf Desa Jumlah 10 (Rp. 200.000) : Rp 1.800.000,

3.2.2. Realisasi

a. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.1
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Tahap	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Bidang Pemberdayaan Sosial	Permensos Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Program: Pemberdayaan Sosial Kegiatan: TKSK Keluaran(Output): terlaksananya operasional TKSK di Kab. Lamongan Rincian Kegiatan: pemberian operasional pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Tenaga Kecamatan (TKSK)	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan		81.000.000	81.000.000	100%	81.000.000	100%	
2	Bidang Rehabilitasi Sosial	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/151/KIT S/013/2021 tentang Penerima Bantuan Sosial	Program: Rehabilitas Sosial Kegiatan: ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Perorangan)	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan	Jan-Des 2022	100.800.000	100.800.000	100%	100.800.000	100%	ASPD perorangan plus tahap
						Juli s/d Desember 2022	33.600.000	33.600.000		33.600.000		Top UP bagi penerima ASPD

												(Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan
			Keluaran(Output): terlaksananya bantuan pada disable berat di Kab. Lamongan									
			Rincian Kegiatan: pemberi bantuan pada disable berat									
3	Kemensos	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan	APBD PROV.	880.470.000	880.470.000	100%	880.470.000	100%	
			Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			APBD	2.943.000.000	2.943.000.000	100%	2.943.000.000	100%	
			Sub Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota									
			Keluaran(Output): terlaksananya pendataan JKN Kab.Lamongan									
			Rincian Kegiatan: melakukan verval JKN									

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.3

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan (Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022)

No	BIDANG URS	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANAAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KE T.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Surat Sekretaris Daerah Jawa Timur Nomor 140/14445/112.2/20 22 Tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten pada P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022	Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa - Kepala Desa - Sekretaris Desa - Kepala Urusan - Kepala Seksi - Kepala Dusun - Staf Desa	LMG	Dinas PMD	Rp. 1.055.450.000	Rp. 986.825.000	93,50%	Rp. 986.825.000	100%	

c. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.4
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	SKPD Pelaksana	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Capaian Kegiatan (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sarana Prasarana Pertanian	<p>1 SP DIPA-018.08.4.059185/2021 tanggal 17 November 2021</p> <p>2 SK No. 188/167/413.119/2022 tentang Penunjukkan Calon Petani Calon Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaaan Menengah, dan Embung Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022</p> <p>3 SK No. 188/196/Kep/413.119/2022 tentang Penetapan KelompokPenerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaaan Menengah, dan Pembangunan Embung Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan</p>	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (RJIT)	Lamongan	Dinas Ketahanna Pangan dan Pertanian	12 paket pembangunan jaringan irigasi	12 paket pembangunan jaringan irigasi	100%	
	Sarana Prasarana Pertanian	SK Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No.17.1/Kpts/SR.030./B/ 01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Kering Tahun Anggaran 2022	Optimasi Lahan Kering	Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<p>3 paket perpompaaan dan perpipaan</p> <p>2 paket rehab jarimgan irigasi</p>	<p>3 paket perpompaaan dan perpipaan</p> <p>2 paket rehab jarimgan irigasi</p>	100%	

						5 paket sumur pantek	5 paket sumur pantek		
	Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 249/HK.310/C/10/2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2022; 2. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 248/HK.310/C/11/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2022	Bantuan Benih Padi	Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	700.000 kg benih padi	700.000 kg benih padi	100%	
	Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 249/HK.310/C/10/2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2022; Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 248/HK.310/C/11/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2022	Bantuan Benih jagung	Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3375 kg benih jagung	3375 kg benih jagung	100%	
	Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 249/HK.310/C/10/2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2022; 2. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 248/HK.310/C/11/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2022	Bantuan Benih Sorghum	Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2000 kg benih sorghum	2000 kg benih sorghum	100%	

d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2.2.5
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	KAB/ KOTA	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Pertanian	1.Perubahan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI No. 12624/KPTS/HK.160/F/10/2021 tentang petunjuk teknis kegiatan penyediaan benih dan bibit ternak serta peningkatan produksi ternak tahun Anggaran 2022. 2.DIPA Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 No. SP DIPA-018.06.4.059181/2022 tanggal 17 November 2021	Program SIKOMANDAN Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak Sapi dan Kerbau Keluaran (output) Dana Operasional petugas IB Rincian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan pada ternak sapi dan kerbau	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. . 2.016.000.000	Rp. 1.590.690.000	100	Pemberian Dana Operasional petugas IB	100	Adanya perubahan target IB & kelahiran

2.	Bidang Pertanian	Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/7090/122.3/2022 tentang Petugas/Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan dan Vaksinasi) dalam rangka Pengendalian dan Penanggulangan PMK di Jawa Timur Tahun 2022	Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Keluaran (output) vaksinasi PMK sejumlah 69.389 dosis Rincian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku(PMK) pada ternak sapi, kerbau, kambing dan domba	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 2.565.000.000,0 0	Rp. 1.715.875.000, 00	66,9 0	Pemberian Dana Operasional petugas vaksin	100	
3.	Bidang Pertanian	DIPA Satker Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Tahun 2022 revisi ke-7 Nomor: SP DIPA-018.06.4.059181/2022 tanggal 14 Juli 2022	Program • Program Penandaan dan Pendataan Ternak Keluaran (output) pemasangan eartag sejumlah 28.667 buah Rincian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan penandaan pada ternak sapi & kerbau	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 882.000.000,00	Rp. 573.340.000,0 0	65	Pemberian Dana Operasional petugas penandaan	100	
4.	Bidang Pertanian	Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun	Program • Program Belanja Bantuan Ternak untuk Kelompok Tani/Ternak, Kelompok Masyarakat di	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Keseha	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0	Pemberian hibah ternak pada : 1.Pokmas Berkah Akar Rumput	100	

		<p>Anggaran 2022 berupa Belanja Bantuan Ternak untuk Kelompok Tani/Ternak, Kelompok Masyarakat di Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat untuk 4 kelompok di Kabupaten Lamongan</p>	<p>Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat untuk 4 kelompok di Kabupaten Lamongan</p> <p>Keluaran (output) hibah ternak</p> <p>Rincian Kegiatan hibah ternak kepada Pokmas Berkah akar Rumput, Pokmas Muda Karya, Pokmas Peternak Muda Lamongan dan Pokmas Karya Mandiri</p>		<p>tan Hewan</p>					<p>Desa Payaman Solokuro Domba ekor Gemuk 45 ekor</p> <p>2.Pokmas Muda Karya Desa Solokuro Sapi PO Betina 10 ekor</p> <p>3.Pokmas Peternak Muda Lamongan Desa Solokuro Sapi PO Betina 10 ekor</p> <p>4.Pokmas. Karya Mandiri, Desa Jatirenggo, Kec. Glagah Sapi PO Betina 6 ekor</p>	
--	--	---	---	--	------------------	--	--	--	--	--	--

5.	Bidang Pertanian	<p>1.Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6690/KPTS/PK.010/F/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2022</p> <p>2.Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana Pengadaan BPTU HPT Pelahari Nomor 00139/Kpts/PL.130/F2.F/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Pengembangan unggas dan Aneka Ternak (Ternak Itik) Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Program • Bantuan Hibah Ternak Itik (Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak)</p> <p>Keluaran (output) hibah itik</p> <p>Rincian Kegiatan Hibah ternak itik pada Kelompok Sumber Rejeki, Kelompok Tunggal Jaya, Kelompok Raharjo dan Kelompok Mulia</p>	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 00,00	Rp. 00,00	0	<p>Pemberian hibah ternak pada:</p> <p>1.Kelompok Sumber Rejeki Desa Tawangrejo Kecamatan Turi berupa itik 500 ekor, kandang 1 paket dan pakan 1 paket</p> <p>2.Kelompok Tunggal Jaya Desa Kemlagigede Kecamatan Turi berupa itik 500 ekor, kandang 1 paket dan pakan 1 paket</p> <p>3.Kelompok Raharjo Desa Plososetro Kecamatan Pucuk berupa itik 500 ekor, kandang 1 paket dan pakan 1 paket</p> <p>4.Kelompok Mulia Desa</p>	100
----	------------------	---	--	---------------	--------------------------------------	-----------	-----------	---	--	-----

									Turi Kecamatan Turi berupa itik 500 ekor, kandang 1 paket dan pakan 1 paket		
6.	Bidang Pertanian	1.DPA-OPD Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.08.00 00/001/2022 tanggal 1 Januari 2022 2.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan bantuan Sosial	Program • Program Anti Poverty Program (APP) Bidang Peternakan Keluaran (output) Hibah Ternak Rincian Kegiatan Hibah Ternak pada Kelompok Sumber Rezeki desa Mantup	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 00,00	Rp. 00,00	0	Pemberian hibah ternak pada Kelompok Ternak Sumber Rezeki Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan berupa: - Kambing betina 24 ekor - Kambing jantan 3 ekor - Pakan konsentrat 486 kg - Obat dan vitamin 1 paket	100	
7.	Bidang Pertanian	1.Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan	Program • Program Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan tertentu Darurat Penyakit Mulut	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan	Rp. 00,00	Rp. 00,00	0	Pemberian kompensasi ganti uang, 1 ekor sapi sebesar 10jt dan	0	Belum terealisasi dari

		dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) 2.Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 8373/KPTS/HK.160/F/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku	dan Kuku (PMK) Keluaran (output) kompensasi ganti uang Rincian Kegiatan kompensasi ganti uang untuk ternak yang mati/potong bersyarat yang disebabkan karena penyakit PMK		tan Hewan				1 ekor kambing sebesar 1,5jt		pusat
8.	Bidang Pertanian	1.Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/619/122.4/2022 tentang Petugas Pemeriksa Antemortem Postmortem dan Status Reproduksi di RPH-R di Jawa Timur Tahun 2022 2.DPA satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur TA 2022 Nomor: 914/245/203.2/2021 tanggal 31 Desember 2021	Program • Kegiatan Pemeriksaan Antemortem Postmortem dan Status Reproduksi di RPH-R di Kabupaten Lamongan Keluaran (output) Petugas Pematangan Hewan yang ASUH Rincian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pematangan Hewan di RPH-R	Kab. Lamongan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 00,00	Rp. 0,00	100	Laporan Pembinaan Petugas Pematangan Hewan	100	

	<p>6. Grant confirmation IDN-H-MOH 2722 Indonesia HIV response :eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030 pada oktober 2021 antara Kementrian RI dan global Fund</p> <p>7. Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan provinsi jawa Timur sebagai Sub Recipient GF-ATM komponen Aids dengan Dinas Kesehatan Kabupaten lamongan sebagai Sub recipient GF-ATM komponen Aids dalam pelaksanaan proyek Indonesia HIV response :Eliminating the Aids Epidemic in Indonesia by 2030, Nomor :HK.03.01/C.1.2/442/2022</p>	<p>dengan Screning HIV melakukan mobile VCT serta BL yang sudah di atur dalam work plane propinsi Jawa Timur</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Permasalahan

- Dasar pengambilan kebijakan Program Pemberian bantuan Peralatan TIK oleh Kemendikbudristek adalah data profil satuan pendidikan pendidikan pada Dapodik, sehingga belum semua satuan pendidikan melakukan input dan update data di Dapodik sesuai kondisi riil di satuan pendidikan masing-masing.
- Belum semua lembaga melakukan update data sarpras pada Dapodik sesuai kondisi riil yang ada di masing-masing lembaga.
- Dalam penetapan satuan pendidikan calon penrima, pemerintah Pusat tidak koordinasi dengan daerah

Kendala

- Belum semua Operator Dapodik memahami akan pentingnya update data sarpras satuan pendidikan pada dapodik
- Karena operator dapodik masih memprioritaskan data peserta didik dan pendidiknya

b. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan:

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH); Tidak ada kendala.
- Kegiatan PBI-JKN;

Kendala masih adanya data yang kurang valid (NIK tidak valid) dengan data Disdukcapil dikarenakan masyarakat yang belum paham tentang kevalidan data dengan Disdukcapil meski sudah dilakukan verval PBI-JKN.

- Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah; Tidak ada kendala.
- Bantuan Sembako; Tidak ada kendala.
- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan; Kendalanya adalah masih adanya warga yang tidak ingin menunjukkan anaknya atau keluarganya yang mengalami cacat berat. Hal ini terbukti dengan tidak dimasukkannya di Kartu Keluarga sehingga tidak memiliki KTP.
- TKSK; Tidak ada kendala.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Permasalahan dan Kendala Tugas Pembantuan Provinsi

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi terkait Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 terdapat permasalahan yaitu:

- Tugas pembantuan dilaksanakan pada bulan Desember atau di akhir tahun.
- Jangka waktu pencairan yang singkat.
- Database Aparatur Pemerintah Desa yang belum terupdate.

d. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kab. Lamongan

Permasalahan dan Kendala

- Adanya pengaruh iklim yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi
- Keterbatasan pengetahuan dan minimnya sosialisasi bantuan pada kelompok sehingga beberapa kelompok penerima bantuan belum siap dan mengundurkan diri.

e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan

Dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK, terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

- jumlah PLKB/PKB tidak seimbang dengan jumlah desa di kabupaten Lamongan sebanyak 474 Desa, sehingga rata-rata PLKB/PKB membina desa dengan perbandingan 1:7

f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

- Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri)
 - Adanya wabah PMK di Kabupaten Lamongan menyebabkan penurunan populasi ternak, jumlah akseptor juga ikut turun.
 - Petugas IB (Inseminasi Buatan) juga banyak yang dilibatkan dalam tim vaksinator PMK sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja pelaksanaan IB di lapangan.

- Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi
 - Jumlah petugas vaksin dan pelapor isikhnas masih terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ternak di pelosok kabupaten secara cepat.
 - Masyarakat masih takut untuk memvaksin ternaknya.
- Program Program Penandaan dan Pendataan Ternak
 - Jumlah petugas yang terbata

g. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian, sebagai berikut :

Closing date program IPDMIP berakhir pada bulan juni 2022 dan batas akhir reimbursement di akhir bulan April 2022. Hal ini membuat waktu pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi (fisik) dan penyelesaian administrasi kegiatan hanya mempunyai waktu yang sangat singkat yaitu 4 bulan (Januari - April).

h. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

- PAMSIMAS
Dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS selama tahun anggaran 2022 tidak terdapat permasalahan.
- Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan
Dalam pelaksanaan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan selama tahun anggaran 2022 tidak terdapat permasalahan.
- Program BSPS
Dalam pelaksanaan Program BSPS selama tahun anggaran 2022 tidak terdapat permasalahan.
- Program KOTAKU
Dalam pelaksanaan Program Kotaku selama tahun anggaran 2022 tidak terdapat permasalahan.

i. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Kegiatan Monitoring dan evaluasi, Supervisi, Distribusi obat, penemuan suspek / kasus, penegakan diagnosa, croscek / follow up, dan Koordinasi lintas program / sector serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular HIV/AIDS melalui kegiatan Akselerasi ARV di tingkat Kabupaten / Kota dengan Screening HIV melakukan mobile VCT serta BL yang sudah di atur dalam work plane propinsi Jawa Timur Sebagai Berikut:

- Penyesuaian jadwal koordinasi dengan lintas sektor
- Perlunya suport dari lintas lintas program di luar seksi bidang pencegahan dan penyakit menular
- Suspek/penderita dengan diagnosa menggunakan prosedur selain TCM
- Kick off di propinsi dilakukan bulan mei 2022 dan pembagian WP ke kabupaten bulan juli 2022 sehingga kegiatan hanya bias dilakukan mulai bulan juli 2022 sampai November 2022 di SSR Dinas Kesehatan kabupaten lamongan.

3.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Saran

Dalam penetapan satuan pendidikan calon penerima bantuan hendaknya Pemerintah Pusat koordinasi dengan Kabupaten/kota masing-masing.

Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pudsat (Kemendikbudristek) untuk pelaksanaan penerimaan bantuan, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan.

b. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Saran dan tindak lanjut :

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH); Tidak ada kendala.

- Kegiatan PBI-JKN;

Untuk itu upaya Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yaitu kerjasama dengan Operator Desa untuk membantu kecocokan NIK masyarakat dengan Disdukpencahil.

- Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah; Tidak ada kendala.
- Bantuan Sembako; Tidak ada kendala.
- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan; Untuk itu upaya Dinas Sosial Kabupaten Lamongan perlu memberikan sosialisasi dan motivasi pada keluarga Disabel berat tentunya kerjasama dengan Mitra Dinsos seperti Paguyupan Disabel, TKSK, PKH. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Disdukpencahil untuk pembuatan KTP bagi Warga Disabilitas untuk bisa mendapatkan bantuan sosial.
- TKSK; Tidak ada kendala.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi terkait Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yaitu:

- Berkoordinasi dengan Kecamatan Database Aparatur Pemerintah Desa.
- Input anggaran di aplikasi SIPD dan percepatan proses pencairan

d. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

Saran dan Tindak Lanjut

- Menunggu banjir mereda dan harus membendung lokasi rehabilitasi agar pengerjaan segera dilaksanakan
- Meningkatkan pengetahuan dan wawasan kelompok melalui sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan.

e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan

Untuk menanggulangi permasalahan yang disebutkan di atas, perlu dilakukan tindak pencegahan antara lain:

- Memaksimalkan peran Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) di lapangan yang memberikan informasi dan bantuan melalui pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi dengan memanfaatkan teknologi.

f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

- Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri):

Penambahan petugas vaksinator dan penandaan dari lembaga pendidikan peternakan dan kesehatan hewan di Lamongan, diharapkan petugas IB dapat kembali focus pada tugas utama sebagai ujung tombak utama dalam program SIKOMANDAN.

- Program Pengendalian Keswan dan Kesmavet, Kegiatan Penjaminan Keswan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi

Perlu bantuan dari stake holder lain dalam pelaksanaan vaksinasi agar target vaksin bisa tercapai lebih cepat.

- Program Program Penandaan dan Pendataan Ternak
Penambahan penandaan dari lembaga pendidikan peternakan dan kesehatan hewan di Lamongan.

g. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

Sesegera mungkin di bulan januari dilaksanakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan percepatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dilapangan.

h. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan selalu siap menerima tugas pembantuan demi keberlanjutan program di Kabupaten Lamongan.

i. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- Melaksanakan advokasi berjenjang kepada lintas sektor
- Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan dengan lintas program bersama secara bertahap
- Melaksanakan Diagnosa sesuai prosedur dengan tambahan asuransi /BPJS
- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan membuat rencana program kegiatan di awal tahun agar bias tertserap semua dana hibah dari globan fund komponen AIDS

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan daerah Provinsi dan SPM pendidikan daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pendidikan anak usia dini
2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini
2. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar
3. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan

Tabel 4.1.1.1
Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan
1.	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Anak Usia 5 sampai dengan 6 tahun
2.	Pelayanan Pendidikan Dasar	Anak Usia 7 sampai dengan 15 tahun
3.	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	Anak Usia 7 sampai dengan 18 tahun

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan pendidikan dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.2.1
Target SPM Bidang Pelayanan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	100%	2022	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100%	2022	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil Dua tahun sebelumnya	2022				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2022	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100%		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	2022				
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2022	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100%	2022	

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan Anak usia dini berupa standar satuan pendidikan, kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik, partisipasi dan pemerataan peserta didik serta kualitas dan pemerataan layanan.

Standar satuan pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian, sedangkan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik berupa kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Partisipasi dan pemerataan peserta didik berupa angka partisipasi kasar dan angka partisipasi sekolah, adapun untuk kualitas dan pemerataan layanan untuk pendidikan dasar baik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun satuan pendidikan kesetaraan mencakup iklim keamanan, iklim kebinekaan dan inklusivitas, sedangkan untuk pendidikan anak usia dini merupakan proporsi jumlah satuan pendidikan anak usia dini merupakan proporsi jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang mendapatkan akreditasi B.

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.3.1
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi	Ket.
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	100%	100%	Jumlah barangjasa dan sumber daya manusia	100%	100%	
		Rata-rata kemampuan literasi Siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional		100%				
		Rata-rata kemampuan numerasi Siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional		100%				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berparisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional						
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan realisasi pelayanan dasar bidang pendidikan kabupaten Lamongan pada tahun 2022 yaitu pada kurun waktu bulan Januari s/d Desember 2022 telah mencapai 100% artinya bahwa seluruh penduduk usia sekolah telah mendapat pelayanan pendidikan pada tahun 2022 sesuai dengan jenjang usia, bakat dan minat masing-masing.

Realisasi jumlah anak usia 7–15 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di kabupaten Lamongan pada tahun 2022 sebanyak 171.958 anak sedangkan jumlah penduduk usia sekolah 7 – 15 tahun sebanyak 171.958 anak, dengan rincian anak usia 7 -15 tahun yang

berpartisipasi pada pendidikan SD/MI sebanyak 114.958 anak dan yang berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs sebanyak 57.000 anak. Dengan demikian penduduk usia 7 – 15 tahun semuanya sudah terlayani pada pendidikan dasar baik SD/MI maupun SMP/MTs (100%) hal dapat dicapai karena adanya kebijakan afirmasi layanan pendidikan terhadap masyarakat miskin berupa beasiswa dan sekolah inklusi yaitu sekolah regular yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus.

Rata-rata kemampuan literasi peserta didik bersarkan hasil Assesmen Nasioanl untuk Pendidikan Dasar sebesar 1,85 dari rentang angka 1-3 yang ditetapkan oleh Kemendibudristek dengan capaian rata-rata untuk kemampuan literasi siswa SD sebesar 1,8 dan siswa SMP sebesar 1, 84, sedangkan untuk kemampuan numerasi siswa pada Pendidkan Dasar dari hasil Assesmen Nasional sebesar 1,72 dan siswa SMP sebesar 1,73

Realisasi jumlah penduduk usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2022 sebanyak 1.713 oarang sedangkan jumlah penduduk usia 7-18 yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau Menengah sebanyak 1.713 orang sehingga partisipasi penduduk usia 7 – 18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah telah mencapai 100%. Untuk rata-rata kemampuan literasi dan numearsi siswa berdasrkan Assesmen Nasional untuk pendidikan kesetaraan pada tahun 2022 secara nasional belum dilaksnakan.

Realisasi jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kabupaten Lamongan tahun 2022 sebanyak 36.327 anak, sedangkan jumlah pendudukn usia 5 -6 tahun di kabupaten lamongan semuanya sudah terlayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hal ini karena adanya kebijakan peningkatan sarana prasarana pendidikan yaitu minimal 1 (satu) desa 1 (satu) PAUD.

Adapun terkait dengan mutu minimal layanan dasar baik barang, jasa maupun sumber daya manusia dapat dilihat pada daftar lampiran ini.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasional yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah. Dana tersebut dapat bersumber dari APBD, APBN, dan Sumber dana lain yang sah. Penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah tentunya menjadi prioritas dalam penganggaran oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Penerapan dan pencapaian tersebut dapat didukung oleh alokasi penganggaran dalam APBN serta Sumber Dana Lainnya yang Sah. Hal tersebut memberi ruang kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah untuk

menggalai potensipembiayaan penerapan dan pencapaian SPM dari luar APBD-nya.

Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.4.1
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)			
		APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	58.095.449.000	-	-	58.095.449.000
2	Pendidikan Dasar	204.262.772.050	-	-	204.262.772.050
3	Pendidikan Kesetaraan	7,294,830,000.00	-	-	7,294,830,000.00
	Jumlah	269,453,051,050.00	-	-	269,453,051,050.00

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2022 (diolah)

Alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.4.2
Alokasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No.	Program Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578,713,518,292,-
2	Program Pengelolaan Pendidikan	269,453,051,050,-
3	Program Pengembangan Kurikulum	100,000,000,-
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80,000,000,-
	Jumlah	848,346,569,342,-

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2022 (diolah)

4.1.5. Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Lamongan meprioritaskan penganggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan. Anggaran tersebut dikelola dalam rangkaian program, kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Pada Tahun Anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 848,346,569,342,- (Delapan ratus

empat puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas Rp 269,453,051,050 (Dua ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima puluh satu ribu lima puluh rupiah) untuk penganggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan, dan Rp 578,893,518,929,- (Lima ratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan. Jumlah anggaran pendidikan secara umum setelah refocusing mengalami kenaikan, namun untuk penerapan pelayanan dasar pendidikan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelum adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, yaitu semula secara keseluruhan sebesar Rp **809,570,018,782,-** (Delapan ratus sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas Rp **256,274,371,000,-** (Dua ratus lima puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk penganggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan Rp **553,115,647,782,-** (Lima ratus lima puluh tiga milyar seratus lima belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan.

Dari keseluruhan anggaran di maksud, realisasi anggaran bulan Januari s/d Desember Tahun 2022 ini adalah sebesar Rp 833.428.418.710,- (Delapan ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas Rp 264.834.736.981,- (Dua ratus enam puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) untuk penganggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan, dan Rp 568.413.981.729,- (lima ratus enam puluh delapan milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan dimaksud.

Realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:.

Tabel 4.1.5.1
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)			Jumlah
		APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	57.925.751.775	-	-	57.925.751.775
2	Pendidikan Dasar	200.745.095.505	-	-	200.745.095.505
3	Pendidikan Kesetaraan	6.163.889.700	-	-	6.163.889.700
	Jumlah	226.674.768.981	-	-	226.674.768.981

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan penunjang dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.5.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No.	Program Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.413.981.729
2	Program Pengelolaan Pendidikan	226.674.768.981,-
3	Program Pengembangan Kurikulum	100.000.000,-
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	79.700.000,-
	Jumlah	833.428.450.710,-

4.1.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan berasal dari personel Dinas Pendidikan. Adapun rincian personel pada Dinas Pendidikan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.6.1
Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon II.b	1

2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	4
4	Eselon IV.a/ Jabatan Fungsional	12
6	Pejabat Fungsional	138
7	Staf PNS	54
8	Staf TKK	33
	Jumlah	243

Sumber : Laporan Kepegawaian 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh formasi jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sudah terisi. Formasi jabatan yang telah terisi secara keseluruhan tersebut sangat menunjang kinerja instansi, dimana kerangka kebijakan strategis diambil oleh Kepala Dinas/ Eselon II.b, pada tataran taktis diarahkan oleh para Kepala Bidang/ Eselon III.b dan dikoordinasikan oleh Sekretaris/ Eselon III.a, sedangkan untuk tataran teknis operasional dilaksanakan oleh para Kasubbag dan Kasi/ Eselon IV.a beserta para Stafnya. Namun demikian, perlu dilakukan penambahan jumlah Staf yang berstatus PNS sehingga dapat menunjang kinerja dinas dimaksud dalam tataran operasional.

4.1.7. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 1. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai standar;
 2. Kualitas dan kuantitas guru belum memenuhi standar;
 3. Belum meratanya kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
 4. Sebagian anak usia sekolah dari keluarga miskin belum mendapatkan bantuan beasiswa dari Program Indonesia Pintar (PIP) karena belum masuk data base DTKS di pusat;
 5. Lembaga pendidikan inklusi belum bisa melayani anak berkebutuhan khusus secara optimal karena keterbatasan pendidik/pendamping untuk anak berkebutuhan khusus.
- b. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan termasuk untuk pembelajaran yang berbasis komputer secara bertahap ;

2. Pemenuhan kebutuhan guru melalui penambahan CPNS maupun guru P3K serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan bimbingan teknis baik secara daring maupun luring.
3. Pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru secara bertahap;
4. Pemberian beasiswa untuk anak – anak dari keluarga miskin;
5. Kerja sama dengan lembaga pendidikan luar biasa terdekat.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terdiri atas sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
12. Pelayanan kesehatan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar kesehatan bayi baru lahir
4. Balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita
5. Usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

6. Usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Penderita diabetes mellitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Orang terduga tuberculosi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
12. Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Tabel 4.2.1.1

Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Usia Produktif
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Usia Lanjut
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Penderita Diabetes Mellitus
9.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Orang terduga Tuberculosis
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Orang dengan resiko terinfeksi HIV
11.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan kesehatan dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.2.1
Target SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah (%)	Target Nasional (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
12.	Pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.3.1
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Indikator SPM	Target	Realisasi
A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	95,01 %
B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
1.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	99,61 %
C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
1.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	99,35 %
D. Pelayanan Kesehatan Balita			
1.	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %
E. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
1.	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	97,33 %
F. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			
1.	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %
G. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
1.	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	96,13 %
H. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus			

1.	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %
I. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis			
1.	Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	145,67 %
J. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)			
1.	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	115,09 %
K. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
1.	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %
L. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			
1.	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dalam rangka penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.4.1
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No.	Jenis Layanan Dasar	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	APBD, BOK	2.554.204.952
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBD, BOK	1.216.843.150
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	APBD, BOK	237.016.078
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	APBD, BOK	1.857.131.350
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	APBD, BOK	1.158.187.202
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia	APBD, BOK	775.723.062

	Produktif		
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	APBD, BOK	94.190.100
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	APBD, BOK	752.090.854
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	APBD, BOK	467.560.900
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	APBD, BOK	608.288.756
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis (TB)	APBD, BOK	576.347.256
		GF (<i>Global Fund</i>)	927.583.058
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	APBD, BOK	549.746.300
		GF (<i>Global Fund</i>)	194.091.850

4.2.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebesar Rp. 11.969.004.869,00. Dengan realiasi Rp. 10.832.185.823,00.

Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terealisasi sebesar Rp. 2.395.559.650,00; untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin terealisasi sebesar Rp. 714.763.515,00; untuk Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir terealisasi sebesar Rp. 198.490.000,00; untuk Pelayanan Kesehatan Balita terealisasi sebesar Rp. 1.812.417.450,00; unruk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar terealisasi sebesar Rp. 1.040.759.600,00; untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif teralisasi sebesar Rp. 742.999.050,00; untuk Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus terealisasi sebesar Rp. 447.677.900,00; untuk Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis terealisasi sebesar Rp. 1.464.673.958,00; untuk Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia terealisasi sebesar Rp. 681.629.850,00; untuk Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi terealisasi sebesar Rp. 705.712.500,00; untuk Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat terealisasi sebesar Rp. 548.669.850,00.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2.5.1
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 2.554.204.952	2.395.559.650	93,79
B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
1.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 1.216.843.150	714.763.515	58,74
C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
1.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 237.016.078	198.490.000	83,75
D. Pelayanan Kesehatan Balita				
1.	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 1.857.131.350	1.812.417.450	97,59
E. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
1.	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 1.158.187.202	1.040.759.600	89,86
F. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
1.	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 775.723.062	742.999.050	95,78
G. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
1.	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 94.190.100,00	78.832.500	83,70
H. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus				
1.	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 467.560.900	447.677.900	95,75
I. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis				
1.	Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	1.503.930.314	1.464.673.958	97,38

J. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
1.	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	743.838.150	681.629.850	91,64
K Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
1.	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 752.090.854,00	705.712.500	93,83
L. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				
1.	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	Rp. 608.288.756,00	548.669.850	90,20
Jumlah		Rp. 11.969.004.869,00	Rp. 10.832.185.823,00	90,50

4.2.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan berasal dari personel Dinas Kesehatan. Adapun rincian personel pada Dinas Kesehatan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.6.1

Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Kesehatan

No.	Spesifikasi	Jumlah
1.	Dokter Umum	346
2.	Bidan	1.072
3.	Perawat	1.686
4.	Kesehatan Masyarakat	19
5.	Gizi	93
6.	Analisis Teknik Lab. Medik	103
7.	Penata Rontgen	0

4.2.7. Permasalahan dan Solusi

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 yang tidak memenuhi target 100%, sebagai berikut:

Tabel 4.2.7.1
Kendala, Permasalahan, dan Solusi Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95,01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan pelayanan ibu hamil, seluruh ibu hamil sudah dilakukan pemeriksaan K4 2. Sebagian ibu hamil ada yang belum masuk masa K4 3. Sebagian ibu hamil bersalin prematur
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99,61	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua ibu bersalin sudah ditolong oleh nakes dan bersalin di fasilitas kesehatan, namun ada sebagian ibu hamil yang pada saat usia kehamilan tua kembali ke daerah asalnya
3.	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	99,35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya semua bayi baru lahir sudah dilakukan pemeriksaan sesuai standar, ada sebagian bayi baru lahir yang belum masuk waktu kunjungan ke-3
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	97,33	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian kecil siswa saat dilakukan skrining tidak masuk karena sakit
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	96,13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada sebagian lansia yang tidak berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis (TB)	144,43	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	115,09	

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Tabel 4.3.1.1

Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Setiap Warga Negara
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Setiap Warga Negara

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan pekerjaan umum dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.2.1

Target SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

No.	Indikator SPM	Target Daerah
A.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %
B.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.3.1
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

A.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari		
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	100 %
B.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	100 %

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebesar Rp. 19.893.854.000,00 yang secara keseluruhan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 18.233.854.000,00 dan untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 1.660.000.000,00

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.4.1
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Sumber Anggaran
		Indikator	Target	Alokasi Anggaran	
1	2	3	4	5	6
Pekerjaan Umum					
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	18.233.854.000,00	APBD, DAK
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	1.660.000.000,00	APBD, DAK
Jumlah				19.893.854.000,00	

4.3.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebesar Rp. 17.410.448.443,00. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari terealisasi sebesar Rp. 15.793.373.400,00; dan untuk Pelayanan Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic terealisasi sebesar Rp. 1.617.075.043,00.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.5.1
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
A.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari			
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rp. 18.233.854.000,00	Rp. 15.793.373.400,00	86,62%

B.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rp. 1.660.000.000,00	Rp. 1.617.075.043,00	97,41%
Jumlah		Rp. 19.893.854.000,00	Rp. 17.410.448.443,00	87,52%

4.3.6. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum berasal dari personil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun rincian personil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3.6.1

Dukungan Personil Pada Bidang Pelayanan Pendidikan

PNS	Non PNS	Total
6 Orang	15 Orang	21 Orang

4.3.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pelayanan air minum yang masih rendah,
2. Kurangnya kualitas air baku yang memenuhi standart kualitas air minum;
3. Kurangnya kuantitas / ketersediaan air baku,
4. Terkendala oleh cuaca yang tidak menentu terutama pada saat curah hujan tinggi lokasi yang berada di wilayah yang rawan banjir menjadi terganggu karena beberapa lokasi perkerjaan ada yang terendam banjir;
5. Membutuhkan teknologi untuk proses pengolahan air yang layak minum
6. Terkendalanya sarana dan prasarana dalam pengolahan limbah
7. Kurangnya keahlian SDM mengenai pengolahan limbah
8. Belum terlaksananya pemeliharaan IPAL komunal yang sudah terbangun
9. Pengelolaan air limbah domestik belum optimal

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan air minum di seluruh wilayah Lamongan dengan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak ketiga;
2. Digunakan teknik pendugaan air bawah tanah (geo listrik) dengan biaya diambilkan dari pagu masing-masing desa. Namun hal ini tidak dapat berhasil 100 % dikarenakan ada beberapa lokasi desa yang memiliki air bawah tanah asin/ payau, keadaan asin/ payau tersebut tidak mampu dideteksi oleh alat geo listrik;
3. Berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai keberadaan air permukaan berupa waduk/ embung sebagai sumber air baku;
4. Meningkatkan pengetahuan / teknologi untuk pengolahan air minum agar sesuai standar
5. Peningkatan sarana dan sarana pada IPLT
6. Peningkatan SDM dengan pembekalan teknis pengolahan limbah
7. Sosialisasi ke masyarakat mengenai pengolahan air limbah domestik
8. Memelihara dan mengoptimalkan operasional IPAL komunal yang sudah ada

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 4.4.1.1

Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Korban bencana kabupaten
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan perumahan rakyat dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.2,1

Target SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

No.	Indikator SPM	Target Daerah
A.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %
B.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.3.3
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

No	Indikator SPM	Target	Realisasi
A	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
1.	Presentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %
B	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	100 %

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebesar Rp. 420.000.000,00 yang secara keseluruhan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM pelayanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana KabupatenKota dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 375.000.000,00; dan untuk pelayanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi programm pemerintah dialokasikan sebesar Rp. 45.000.000,00.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.4.1

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran			Total
		APBD	APB N	Sumber Lain Yang Sah	
A.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota				
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rp. 375.000.000,00	-	-	Rp. 375.000.000,00
B.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota				
1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rp. 45.000.000,00	-	-	Rp. 45.000.000,00
Jumlah		Rp. 420.000.000,00			Rp. 420.000.000,00

4.4.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebesar Rp. 416.442.000,00. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota terealisasi sebesar Rp. 371.940.500,00; dan untuk Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota terealisasi sebesar Rp. 44.501.500,00.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.5.1

Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
A.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota			
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rp. 375.000.000,00	Rp. 371.940.500,00	88,56%
B.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			
1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rp. 45.000.000,00	Rp. 44.501.500,00	98,896%
Jumlah		Rp. 420.000.000,00	Rp. 416.442.000,00	99.15%

4.4.6. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat berasal dari personil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun rincian personil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4.6

Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pendidikan

PNS	Non PNS	Total
2 Orang	4 Orang	6 Orang

4.4.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data rumah yang menjadi korban bencana

2. Belum adanya Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam
3. Belum tersedianya kriteria penerima bantuan
4. Belum tersedianya SOP penanganan rumah korban bencana
5. Belum tersedianya anggaran yang spesifik untuk korban bencana
6. Belum tersedianya data rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
7. Belum adanya Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
8. Belum tersedianya kriteria penerima bantuan
9. Belum tersedianya SOP penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
10. Belum tersedianya anggaran yang spesifik untuk masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendataan rumah korban bencana
2. Koordinasi dengan dinas dan desa/ kecamatan terkait
3. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam
4. Menyusun Surat Keputusan yang berisi kriteria penerima bantuan
5. Menyusun SOP penanganan rumah korban bencana
6. Mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi penanganan rumah korban bencana
7. Pendataan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
8. Koordinasi dengan dinas dan desa/ kecamatan terkait
9. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
10. Menyusun Surat Keputusan yang berisi kriteria penerima bantuan
11. Menyusun SOP penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
12. Mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi
2. Pelayanan Ketentramana dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu
3. Pelayanan informasi rawan bencana
4. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
3. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Tabel 4.5.1.1

Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Warga Negara/ Masyarakat

2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Warga Negara/ Masyarakat
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Warga Negara di kawasan rawan bencana
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)
6.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penduduk yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target SPM pada pelayanan bidang pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5.2.1

Target SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator SPM	Target Daerah
A.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	
1.	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100%
B.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	
1.	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100%
C.	Pelayanan informasi rawan bencana	
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%

D. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
E. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
F. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5.3.1

Realisasi SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator SPM	Target	Realisasi
A.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		
1.	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100%	100%
B.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu		
1.	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100%	100%
C.	Pelayanan informasi rawan bencana		
1.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
D.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	100 %

	korban bencana)		
E.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebesar Rp.6.430.707.405,00 yang berasal dari dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lamongan tahun anggaran 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 satu Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran dana sebesar Rp 5.408.652.065,00 ; untuk Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 4.649.608.065,00; untuk Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 180.000.000,00; untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dialokasikan dana sebesar Rp. 112.022.000,00; untuk Pelayanan informasi rawan bencana dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 123.033.000,00; untuk Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dialokasikan dana sebesar Rp. 276.800.000,00; dan untuk Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dialokasikan dana sebesar Rp. 330.200.000,00.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5.4.1

**Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat**

No.	Indikator SPM	Alokasi Anggaran			Total
		APBD	APBN	Sumber Lain Yang Sah	
A.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi				
1.	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Rp. 4.649.608.065,00	-	-	Rp. 4.649.608.065,00
B.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu				
1.	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Rp. 759.044.000,00			Rp. 759.044.000,00
C.	Pelayanan informasi rawan bencana				
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Rp. 123.033.000,00			Rp. 123.033.000,00
D.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp. 276.800.000,00	-	-	Rp. 276.800.000,00
E.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp. 330.200.000,00	-	-	Rp. 330.200.000,00
F.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Rp. 292.022.340,00	-	-	Rp. 292.022.340,00
Jumlah		Rp. 6.430.707.405,00	-	-	Rp. 6.430.707.405,00

4.5.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebesar Rp. Rp. 6.430.707.405,00 dari keseluruhan dana dimaksud terealisasi sebesar Rp.4.516.636.660.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5.5.1
Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
A.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			
1.	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Rp. 4.649.608.065,00	Rp . 2.489.059.860,00	53,53%
B.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			
1.	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Rp. 759.044.000,00	Rp758.709.700,00	99,96%
C.	Pelayanan informasi rawan bencana			
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Rp. 123.033.000,00	Rp. 93.033.000,00	75,62%
D.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
1.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp. 276.800.000,00	Rp. 194.599.000,00	70,30%
E.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	Rp. 330.200.000,00	Rp. 326.970.000,00	99,02%
F.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Rp 292.022.340,00	Rp 289.265.100,00	99,06%
Jumlah		Rp. 6.430.707.405,00	Rp.4.516.636.660	

4.5.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat berasal dari personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun rincian personel pada Dinas Pendidikan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5.6.1
Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

NO		JUMLAH
a. Satpol. PP		
1.	Pejabat	22 Orang
2.	Staf	212 Orang
b. BPBD		
1.	PNS	19 Orang
2.	Non PNS	42 Orang

4.5.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pada tahapan pengumpulan data masih ada data yang belum terkelola dengan baik oleh bidang
2. Kurang optimalnya anggaran untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM pada program maupun kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
3. Masih kurangnya sosialisasi maupun bimbingan teknis penyusunan laporan SPM yang sesuai dengan aturan yang berlakun
4. Belum adanya Rencana Kontijensi bencana Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dan Kekeringan
5. Kurangnya Koordinasi antara forum relawan di kabupaten Lamongan sebagai penunjang penanganan darurat bencana
6. Terbatasnya sosialisasi untuk opd, terkait dengan spm
7. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di daerah rawan bencana dalam penanganan bencana
8. Belum optimalnya pelatihan secara khusus di adakan di sekolah rawan bencana

9. Kurang ketertiban dalam inventarisasi di gudang.
10. Terbatasnya alokasi pendanaan untuk pemulihan dan penataan kembali kerusakan akibat bencana baik dibidang fisik maupun non fisik
11. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan di bidang teknis atau yg berkaitan dengan kebencanaan
12. Belum adanya kajian menyeluruh kebutuhan pasca bencana sehingga kurang informasi dalam perencanaan

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbaikan system pelaporan dari masing-masing bidang selaku pelaksana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya penegakan perda
2. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah, sebagai upaya terwujudnya pelaksanaan kegiatan
3. Mengupayakan sosialisasi maupun bimbingan teknis penyusunan SPM sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Perlu adanya rencana kontijensi bencana banjir, longsor, angin puting beliung dan kekeringan
5. Perlu diadakan pelatihan relawan sebagai koordinasi
6. Perlu diadakan pelatihan desa tangguh lebih banyak
7. Perlu diadakan khusus untuk sekolah di wilayah rawan bencan
8. Perlu diadakan pelatihan penanganan darurat khusus anggota tim trc
9. Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pemulihan dan penata kembali kerusakan
10. Perlunya pemahaman intensif antar pemangku kepentingan dalam urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2021 berpedoman pada peraturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 10 ayat (2) jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial tersebut meliputi :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Tabel 4.6.1.
Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Penyandang Disabilitas Terlantar
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Anak Terlantar
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Lanjut usia terlantar
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Gelandangan dan Pengemis
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Korban bencana kabupaten

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan sosial dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6.2.1
Target SPM Bidang Pelayanan Sosial

No.	Indikator SPM	Target Daerah
A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
B.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	
1.	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
C.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
D.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	
1.	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
E.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota	

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6.3.1
Realisasi SPM Bidang Pelayanan Sosial

No.	Indikator SPM	Target	Target	Realisasi	Realisasi
A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti					
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	4.025	100%	4.025
B. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti					
1.	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	13.897	99.99%	13.897
C. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti					
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	10.017	99.75%	10.017
D. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti					
1.	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	86	100%	86
E. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota	100%	8.638	100%	8.638

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebesar Rp. 663.400.000,00 (APBD) dan Rp. 10.528.862.000, 00 (APBN),. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 1.547.026.000,00; untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 5.427.250.000,00; untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 3.902.917.000,00; untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 72.309.000,00; dan untuk Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran dana sebesar Rp. 242.760.000,00.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6.4.1

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Sosial

No.	Indikator SPM	Alokasi Anggaran			Total
		APBD	APBN	Sumber Lain Yang Sah	
A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti				
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	94.826.000	1.452.200.000	-	1.547.026.000
B.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti				
1.	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	240.450.000	5.186.800.000	-	5.427.250.000
C.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti				
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	168.315.000	3.734.602.000	-	3.902.917.000
D.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti				
1.	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Rp. 21.000.000,00	-	-	Rp. 21.000.000,00

E. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota	87.500.000	155.260.000	-		242.760.000
Jumlah		663.400.000	10.528.862.000	-		11.192.262.000

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2022 (diolah)

Alokasi anggaran program dan kegiatan penunjang dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.4.2
Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan
Penunjang Pencapaian SPM Bidang Sosial
Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No.	Kegiatan Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000
2	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	30.000.000
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000
	Jumlah	500.000.000

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2022 (diolah)

4.6.5. Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadikan prioritas penganggaran guna penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial. Anggaran tersebut dikelola dalam rangkaian program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Pada Tahun Anggaran 2022, alokasi anggaran dalam rangka

pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp 11.192.262.000,- (Sebelas milyar serratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas alokasi APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 663.400.000,- (Enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan alokasi APBN Pusat sebesar Rp 10.528.862.000,- (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Keseluruhan alokasi anggaran tersebut dikelola melalui Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk penganggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp **500.000.000,-** (Lima ratus juta rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial. Alokasi anggaran tersebut terdiri atas alokasi untuk program dan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah), Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh jutarupiah), Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Dari keseluruhan anggaran dimaksud, realisasi anggaran bulan Januari s/d Desember Tahun 2022 (Semester I dan II) adalah sebesar Rp 11.622.392.600,- (Sebelas milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Rp Rp 11.192.262.000,- (Sebelas milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk penganggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial, dan Rp 430.130.600 (Empat ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial dimaksud.

Realisasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6.5.1

Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah
		APBD Kab.	APBN	Lainnya	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	94.826.000	1.452.200.000	-	1.547.026.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anakterlantar di luar panti;	240.450.000	5.186.800.000	-	5.427.250.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	168.315.000	3.734.602.000	-	3.902.917.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tunasosial khususnya gelandangan danpengemis di luar panti;	72.309.000	-	-	72.309.000
5	Perlindungan danjaminan sosial pada saatdan setelahtanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.	87.500.000	155.260.000	-	242.760.000
	Jumlah	663.400.000	10.528.862.000	-	11.192.262.000

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2022 (diolah)

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan penunjang dalam rangkapenerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6.5.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang
Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No.	Kegiatan Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	156.300.000
2	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	10.754.000
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	132.747.600
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	130.329.000
	Jumlah	430.130.600

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2022 (diolah)

4.6.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan berasal dari personel Dinas Pendidikan. Adapun rincian personel pada Dinas Pendidikan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6.6.1

Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	4
4	Eselon IV.a	3
6	Pejabat Fungsional	12
7	Staf PNS	5
8	TKK	23
	Jumlah	49

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh formasi jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sudah terisi. Formasi jabatan yang telah terisi secara keseluruhan tersebut sangat menunjang kinerja instansi, dimana kerangka kebijakan strategis diambil oleh Kepala Badan/

Eselon II.b, pada tataran taktis diarahkan oleh para Kepala Bidang/ Eselon III.b dan dikoordinasikan oleh Sekretaris/ Eselon III.a, dan tataran teknis operasional dilaksanakan oleh para Kasubbag / Eselon IV.a, Pejabat Fungsional dan para Staf. Namun demikian, perlu dilakukan penambahan jumlah Staf sehingga dapat menunjang kinerja dinas dimaksud dalam tataran operasional.

4.6.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Data dimiliki oleh masing-masing operator program dan kegiatan pada masing-masing bidang, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik
2. Perhitungan kebutuhan untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti relatif susah dilakukan, karena umumnya gepeng dan pengemis hidup tidak menetap (berpindah-pindah)
3. Keterbatasan dukungan dana dan fasilitas
4. Dalam Aspek Pelaksanaan
 - Sarana dan Prasarana LIPOSOS belum memadai
 - Fasilitas penyelenggaraan panti sosial untuk kegiatan usaha produktif belum tercukupi
 - Santunan Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis dan Bekas Narapidana belum memadai
 - Fasilitas peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada tokoh masyarakat, LSM dan PPKS yang berpotensi melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan masih terbatas
 - Pemberian bantuan penanggulangan bencana masih belum optimal
 - Sarana dan prasarana pemberdayaan generasi muda masih belum memadai

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar operator program dan kegiatan pada masing-masing Bidang
2. Koordinasi dengan berbagai OPD terkait

3. Identifikasi dan usulan prioritas untuk mendapatkan dukungan dana dan fasilitas
4. Dalam aspek pelaksanaan
 - Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya dan manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
 - Penerapan prinsip nilai (transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas) tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
 - Identifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi tantangan dan potensi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan berbasis data yang valid dan update;
 - Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - Sosialisasi kepada sektor swasta dan masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
 - Pembinaan, pemberdayaan dan pendayagunaan sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun berbagai proram dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

1) Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.1

Program Kegiatan Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan siswa PAUD
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
2.	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biayan Personil Peserta Didik
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
3.	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan perlengkapan pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Penyelenggaraan proses belajar Nonformal/ Kesetaraan

Selain itu, berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan tersebut didukung berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya sebagai berikut:

a. Program Penunjang urusan Pemerintahan

- 1) Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

b. Program Pengembangan Kurikulum

- 1). Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
- 2). Penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 1). Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

2) Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.2.1**Program Kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan**

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
4.	Pelayanan kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

		Kesehatan Masyarakat	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus - Pengadaan Bahan Habis Pakai
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi (<i>Human Immundeficiency Virus</i>)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

3) Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.3.

Program Kegiatan Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
A.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
1.	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
B.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik		
1.	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.4.1

Program Kegiatan Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
A.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten		
1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Pembangunan Perumahan	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten
B.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten		
1.	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	Sosialisasi dan persiapan Pemyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

5) UrusanTrantibumlinmas

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daeah Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.5.1

Program Kegiatan Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat – Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
A.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu		
1.	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penengakan Peratuaran Daearah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Tabel 4.6.6.2

**Program Kegiatan Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat - Badan Penanggulangan Bencana
Daerah**

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
A.	Pelayanan informasi rawan bencana		
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<p>Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana</p> <p>Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan rawan bencana</p> <p>Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana</p> <p>Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana</p> <p>Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana</p>
B.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
1.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<p>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)</p>
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<p>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana</p> <p>Respon cepat darurat bencana</p>

			Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
			Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana
			Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas

6) Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.6.1

Program Kegiatan Bidang Pelayanan Sosial

No	Indikator Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan
A.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan

			Kedaruratan
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Perorangan (ASPD)	-
		Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Harapan Jaminan Sosial Lanjut Usia (PKH Plus Jaslut), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	-
B. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			
1.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan

			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	-
C.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	-

D.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
1.	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
E.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota		
1.	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Program Kenangan Warga Negara Migran	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Cadangan beras Pemerintah untuk korban bencana Pemulangan Warga Negara Migran Kota Tindak Kekerasan dari

		Korban Tindak Kekerasan	Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
--	--	-------------------------	---

Selain itu, berbagai program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tersebut didukung berbagai program dan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - (1).Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat KewenanganKabupaten/Kota
 - (2).Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial KecamatanKewenangan Kabupaten/Kota
 - (3).Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota
 - (4).Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (5).Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan LembagaKonsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - (1).Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - (2).Pemberian Layanan Kedaruratan;
 - (3).Penyediaan Permakanan
- c. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - (1).Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - (2).Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - (3).Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - (4).Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), selain substansi tersebut LPPD juga memuat laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Hasil pembangunan di Kabupaten Lamongan pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kabupaten Lamongan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan lainnya.

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2022, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kabupaten Lamongan guna mewujudkan masyarakat Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Lamongan , Maret 2023

BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

**PELAPORAN IKK MAKRO 2022
KABUPATEN LAMONGAN**

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	LAJU KINERJA 2022	SATUAN	PEMDA
							KETERANGAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	73.12	74.02	1.231	%	BAPPELITBANGDA
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	13.86	12.53	-9.596	%	BAPPELITBANGDA
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	4.9	6.05	23.469	%	BAPPELITBANGDA
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.43	5.56	62.099	%	BAPPELITBANGDA
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	41.04	45.44	10.721	%	BAPPELITBANGDA
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0.292	0.273	-6.507	%	BAPPELITBANGDA

PELAPORAN IKK OUTPUT (KELUARAN) 2022 KABUPATEN LAMONGAN

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
1	Pendidikan	1.a.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	700	DINAS PENDIDIKAN
2	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	36327	DINAS PENDIDIKAN
3	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5450	DINAS PENDIDIKAN
4	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	3747	DINAS PENDIDIKAN
5	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada PAUD	3121	DINAS PENDIDIKAN
6	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	2436	DINAS PENDIDIKAN
7	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem.	1631	DINAS PENDIDIKAN
1	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	697	DINAS PENDIDIKAN
2	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	114958	DINAS PENDIDIKAN
3	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	57000	DINAS PENDIDIKAN
4	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3938	DINAS PENDIDIKAN
5	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13092	DINAS PENDIDIKAN
6	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	4848	DINAS PENDIDIKAN
7	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2480	DINAS PENDIDIKAN
8	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4942	DINAS PENDIDIKAN
9	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2657	DINAS PENDIDIKAN
10	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1256	DINAS PENDIDIKAN
11	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	790	DINAS PENDIDIKAN
12	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	848	DINAS PENDIDIKAN

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
13	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	765	DINAS PENDIDIKAN
14	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4723	DINAS PENDIDIKAN
15	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2537	DINAS PENDIDIKAN
16	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	623	DINAS PENDIDIKAN
17	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	155	DINAS PENDIDIKAN
18	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	187	DINAS PENDIDIKAN
19	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	525	DINAS PENDIDIKAN
1	Pendidikan	1.a.4	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	36	DINAS PENDIDIKAN
2	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1713	DINAS PENDIDIKAN
3	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	257	DINAS PENDIDIKAN
4	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	188	DINAS PENDIDIKAN
5	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	144	DINAS PENDIDIKAN
6	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	109	DINAS PENDIDIKAN
7	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	623	DINAS PENDIDIKAN
8	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	26	DINAS PENDIDIKAN
1	Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	17	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	17	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	3	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	96	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	96	KESEHATAN

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
1	Kesehatan	1.b.6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	128	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	120	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	160	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	192	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.10	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	192	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	160	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.12	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	64	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	120	KESEHATAN
1	Kesehatan	1.b.14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	KESEHATAN
2	Kesehatan	1.b.14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	120	KESEHATAN
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1525.39	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	199000	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	23	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	81.87	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	72.28	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	66.06	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak)	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	289453	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	13874	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	303327	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	1205	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	1205	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1205	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	100	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0.4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	29.81	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	111	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	11.11	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	1.85	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0.46	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	79.12	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	106	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	1368	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	665.48	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dibangun	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dibangun	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	43.88	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	80.71	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	3.51	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	213.05	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dipelihara	63.41	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dipelihara	796.65	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	700	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	291	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	291	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
17	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
8	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	65.33	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	756	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	24.01	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah di kab/kota	303327	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah unit PK RTLH	756	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah tidak layak huni	15556	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Rasio rumah dan KK	1.37	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah pembangunan baru	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	209060	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	209060	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	209060	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	209060	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	209060	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	209060	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	93	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
8	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang terregistrasi	93	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	75	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	9	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya sarana prasarana minimal	7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	36.86	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	36.8	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	59.68	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	352	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	28	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	36	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	75	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	897	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	70	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Sosial	1.f.1	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	1	Sosial
2	Sosial	1.f.1	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1	Sosial
3	Sosial	1.f.1	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	Sosial
4	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	28024	Sosial
5	Sosial	1.f.1	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	Sosial
6	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1500	Sosial
7	Sosial	1.f.1	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Sosial
8	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	500	Sosial
9	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	1	Sosial
10	Sosial	1.f.1	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	1	Sosial
11	Sosial	1.f.1	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1	Sosial
12	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	1	Sosial
13	Sosial	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1	Sosial
14	Sosial	1.f.1	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	948	Sosial
15	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	28024	Sosial
16	Sosial	1.f.1	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	28024	Sosial
17	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	28024	Sosial

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
18	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	28024	Sosial
19	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	28024	Sosial
20	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	86	Sosial
21	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	86	Sosial
1	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	8638	Sosial
2	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	10	Sosial
3	Sosial	1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	Sosial
4	Sosial	1.f.2	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	42	Sosial
5	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	8638	Sosial
6	Sosial	1.f.2	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	67	Sosial
1	Tenaga Kerja	2.a.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Tenaga Kerja
2	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	88.99	Tenaga Kerja
3	Tenaga Kerja	2.a.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	516	Tenaga Kerja
1	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	Tenaga Kerja
2	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	Tenaga Kerja
3	Tenaga Kerja	2.a.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	4.87	Tenaga Kerja
4	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang terakreditasi	1.56	Tenaga Kerja
5	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang memiliki perizinan	84.38	Tenaga Kerja
6	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah penganggur yang dilatih	308	Tenaga Kerja
7	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Tenaga Kerja
8	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penyerapan lulusan	100	Tenaga Kerja
9	Tenaga Kerja	2.a.2	Lulusan bersertifikat kompetensi	100	Tenaga Kerja
10	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	100	Tenaga Kerja
11	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	8	Tenaga Kerja
1	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	2.71	Tenaga Kerja
2	Tenaga Kerja	2.a.3	Data tingkat produktivitas total	3.81	Tenaga Kerja
1	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	11.05	Tenaga Kerja
2	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	14.29	Tenaga Kerja
3	Tenaga Kerja	2.a.4	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	4.406	Tenaga Kerja

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
4	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	87.1	Tenaga Kerja
5	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	93.41	Tenaga Kerja
6	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1.16	Tenaga Kerja
7	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah mogok kerja	0	Tenaga Kerja
8	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah penutupan perusahaan	0	Tenaga Kerja
9	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan kepentingan	1	Tenaga Kerja
10	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Tenaga Kerja
11	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan PHK	5	Tenaga Kerja
12	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	Tenaga Kerja
13	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	Tenaga Kerja
14	Tenaga Kerja	2.a.4	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Tenaga Kerja
15	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	83.33	Tenaga Kerja
1	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1434	Tenaga Kerja
2	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3704	Tenaga Kerja
3	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	39	Tenaga Kerja
4	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	40	Tenaga Kerja
5	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	6	Tenaga Kerja
6	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Tenaga Kerja
7	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	12855	Tenaga Kerja
8	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Tenaga Kerja
9	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100	Tenaga Kerja
10	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	735	Tenaga Kerja
11	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	75	Tenaga Kerja
12	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100	Tenaga Kerja
13	Tenaga Kerja	2.a.5	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	31.25	Tenaga Kerja
14	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Tenaga Kerja

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	61	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	33	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	94	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	27	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	92	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	7	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	Pangan	2.h.1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Pangan
2	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Pangan
3	Pangan	2.h.1	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Pangan
4	Pangan	2.h.1	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	Pangan
5	Pangan	2.h.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Pangan
6	Pangan	2.h.1	Tertanganinya kerawanan pangan	1	Pangan
7	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	1	Pangan
8	Pangan	2.h.1	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	Pangan
1	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	101.53	PERTANAHAN
2	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	PERTANAHAN
3	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	PERTANAHAN
4	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	Dokumen Izin membuka tanah	100.01	PERTANAHAN
5	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	PERTANAHAN
1a	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	58.39	Lingkungan Hidup
1b	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.05	Lingkungan Hidup
1c	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	39.76	Lingkungan Hidup
1	Lingkungan Hidup	2.j.2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1	Lingkungan Hidup
1	Lingkungan Hidup	2.j.3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	Lingkungan Hidup
2	Lingkungan Hidup	2.j.3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	10.81	Lingkungan Hidup
3	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	Lingkungan Hidup

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
4	Lingkungan Hidup	2.j.3	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Lingkungan Hidup
5	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	100	Lingkungan Hidup
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perkawinan	100	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perceraian	100	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta kematian	100	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penyajian data kependudukan	44.9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	92	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	61	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	29.79	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	0	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
4	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
5	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	4195	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22.22	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
4	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	100	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	71.34	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	58.47	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	95.65	Perhubungan
2	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	54.13	Perhubungan
3	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	14.29	Perhubungan
4	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	93.58	Perhubungan
1	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Komunikasi dan Informatika
2	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Komunikasi dan Informatika
3	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	Komunikasi dan Informatika

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
1	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	Komunikasi dan Informatika
2	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Komunikasi dan Informatika
3	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Komunikasi dan Informatika
4	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Komunikasi dan Informatika
5	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	Komunikasi dan Informatika
6	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	2.63	Komunikasi dan Informatika
7	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	58.33	Komunikasi dan Informatika
8	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Komunikasi dan Informatika
9	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	37.84	Komunikasi dan Informatika
10	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Komunikasi dan Informatika
11	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Komunikasi dan Informatika
12	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Komunikasi dan Informatika
13	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Komunikasi dan Informatika
14	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Komunikasi dan Informatika
1	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	Komunikasi dan Informatika
2	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	12.61	Komunikasi dan Informatika
3	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	80.25	Komunikasi dan Informatika

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	64.29	KOPERASI
2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	64.29	KOPERASI
3	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.22	KOPERASI
4	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	47.17	KOPERASI
5	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20.06	KOPERASI
6	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.53	KOPERASI
7	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20.06	KOPERASI
8	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	7.49	KOPERASI
9	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	56.81	KOPERASI
10	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7.49	KOPERASI
11	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2.02	KOPERASI
12	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7.49	KOPERASI
13	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7.49	KOPERASI
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.44	KOPERASI
2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	96.8	KOPERASI
3	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.04	KOPERASI
4	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0.03	KOPERASI

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
5	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.04	KOPERASI
6	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0.02	KOPERASI
7	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	22.15	KOPERASI
1	Penanaman Modal	2.q.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Penanaman Modal
2	Penanaman Modal	2.q.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	Penanaman Modal
3	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Penanaman Modal
4	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	Penanaman Modal
5	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan pameran penanaman modal	3	Penanaman Modal
6	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Penanaman Modal
7	Penanaman Modal	2.q.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	368	Penanaman Modal
8	Penanaman Modal	2.q.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	13894	Penanaman Modal
9	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan realisasi penanaman modal	1.866E+12	Penanaman Modal
10	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	34	Penanaman Modal
11	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	0	Penanaman Modal
12	Penanaman Modal	2.q.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	1	Penanaman Modal
1	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	57	Kepemudaan dan Olahraga
2	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Kepemudaan dan Olahraga
1	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	98	Kepemudaan dan Olahraga
2	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	28	Kepemudaan dan Olahraga
1	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	42	Kepemudaan dan Olahraga
2	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	21	Kepemudaan dan Olahraga
1	Statistik	2.s.1,2.s.2	Tersedianya buku profil daerah	0	STATISTIK
2	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	STATISTIK
3	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	STATISTIK
4	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	STATISTIK
5	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	STATISTIK
6	Statistik	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	46.28	STATISTIK

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
7	Statistik	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	106.57	STATISTIK
1	Persandian	2.t.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	Persandian
2	Persandian	2.t.1	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	33.33	Persandian
3	Persandian	2.t.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	Persandian
4	Persandian	2.t.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	Persandian
1	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	1915	Kebudayaan
2	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	1149	Kebudayaan
3	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	383	Kebudayaan
4	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	2396	Kebudayaan
5	Kebudayaan	2.u.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemingkatan, penghapusan)	25	Kebudayaan
6	Kebudayaan	2.u.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	9	Kebudayaan
7	Kebudayaan	2.u.1	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	
8	Kebudayaan	2.u.1	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	5	Kebudayaan
9	Kebudayaan	2.u.1	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	3	Kebudayaan
10	Kebudayaan	2.u.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	2078	Kebudayaan
11	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	204469	Kebudayaan
12	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	10	Kebudayaan
13	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
14	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0	
15	Kebudayaan	2.u.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0	
16	Kebudayaan	2.u.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	4	Kebudayaan
17	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	2	Kebudayaan
18	Kebudayaan	2.u.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2	Kebudayaan
19	Kebudayaan	2.u.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	8	Kebudayaan
1	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	5.73	Perpustakaan
2	Perpustakaan	2.v.1	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	64.29	Perpustakaan
3	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0	Perpustakaan
4	Perpustakaan	2.v.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2.85	Perpustakaan
5	Perpustakaan	2.v.1	Jumlah pemsarakatangemar membaca di masyarakat	108	Perpustakaan
1	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	2	Perpustakaan
2	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	2	Perpustakaan
3	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2	Perpustakaan
1	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Kearsipan
2	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Kearsipan
3	Kearsipan	2.w.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0.01	Kearsipan
4	Kearsipan	2.w.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	4.68	Kearsipan
1	Kearsipan	2.w.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	64	Kearsipan
2	Kearsipan	2.w.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	101	Kearsipan
3	Kearsipan	2.w.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	102	Kearsipan
4	Kearsipan	2.w.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	327	Kearsipan
5	Kearsipan	2.w.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	4	Kearsipan

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
6	Kearsipan	2.w.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Kearsipan
1	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1008	Kelautan dan Perikanan
2	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100	Kelautan dan Perikanan
3	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	6	Kelautan dan Perikanan
4	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	165	Kelautan dan Perikanan
5	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	666356000	Kelautan dan Perikanan
1	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	34	Pariwisata
2	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	16	Pariwisata
3	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	157	Pariwisata
4	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	87	Pariwisata
5	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4	Pariwisata
6	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Pariwisata
7	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	3	Pariwisata
8	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	8.75	Pariwisata
9	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	4.875	Pariwisata
10	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	Pariwisata
1	Pertanian	3.c.1	Sarana pertanian yang diberikan	264457	PERTANIAN
2	Pertanian	3.c.1	Prasarana pertanian yang digunakan	116	PERTANIAN

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
3	Pertanian	3.c.1	Penerbitan izin usaha pertanian	1	PERTANIAN
4	Pertanian	3.c.1	Persentase prasarana yang digunakan	100	PERTANIAN
5	Pertanian	3.c.1	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100	PERTANIAN
1	Pertanian	3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	PERTANIAN
1	Kehutanan	3.d.1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	KEHUTANAN
2	Kehutanan	3.d.1	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	KEHUTANAN
3	Kehutanan	3.d.1	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	KEHUTANAN
4	Kehutanan	3.d.1	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	KEHUTANAN
1	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	Energi dan Sumber Daya Mineral
1a	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	100	Perdagangan
1b	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100	Perdagangan
2	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan TDG	100	Perdagangan
3	Perdagangan	3.f.1	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	4.4	Perdagangan
4	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	100	Perdagangan
5	Perdagangan	3.f.1	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Perdagangan
1	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Perdagangan
2	Perdagangan	3.f.1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	Perdagangan
3	Perdagangan	3.f.1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	30	Perdagangan
1	Perdagangan	3.f.2	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0.15	Perdagangan
1	Perdagangan	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	43.58	Perdagangan
2	Perdagangan	3.f.3	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	44.32	Perdagangan
1	Perindustrian	3.g.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Perindustrian
1	Perindustrian	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100	Perindustrian
1	Perindustrian	3.g.3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	Perindustrian

No IKK	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	PEMDA	
				Nilai	Keterangan
2	Perindustrian	3.g.3	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Perindustrian
1	Perindustrian	3.g.6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	1.92	Perindustrian
1	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	TRANSMIGRASI
2	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	TRANSMIGRASI
3	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	TRANSMIGRASI

PELAPORAN IKK HASIL (OUTCOME) 2022 KABUPATEN LAMONGAN

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	
				Capaian	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 36.327. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 36.327	100	DINAS PENDIDIKAN
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 114.958. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 114.958	100	DINAS PENDIDIKAN
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 57. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 57	100	DINAS PENDIDIKAN
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 1.713. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 1.713	100	DINAS PENDIDIKAN
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1596. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 1381414	1.1553379	DINAS KESEHATAN
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 12. Jumlah RS di kabupaten/kota = 17	70.5882353	DINAS KESEHATAN

1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 15327. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 16132	95.0099182	DINAS KESEHATAN
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 15338. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 15398	99.610339	DINAS KESEHATAN
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 14569. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 14665	99.3453802	DINAS KESEHATAN
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 60245. Jumlah balita di kabupaten/kota = 60245	100	DINAS KESEHATAN
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 119443. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 122724	97.3265213	DINAS KESEHATAN
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 770147. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 770147	100	DINAS KESEHATAN
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 191478. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 199192	96.1273545	DINAS KESEHATAN
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 336361. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 336361	100	DINAS KESEHATAN
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 23264. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 23264	100	DINAS KESEHATAN

1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 15. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 15	100	DINAS PERKIM DAN CIPTA KARYA
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 1. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1	100	DINAS PERKIM DAN CIPTA KARYA
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 24.01. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 65.33	36.7518751	DINAS PERKIM DAN CIPTA KARYA
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 15556. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 303327	5.1284587	DINAS PERKIM DAN CIPTA KARYA
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 209060. Jumlah unit rumah kab/kota = 303327	68.9223182	DINAS PERKIM DAN CIPTA KARYA
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 	Jumlah pengaduan yang ditangani = 5. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 5	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = 9. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 9	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 588635. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 588635	100	BPBD

1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 216946. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 588635	36.8557765	BPBD
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 391516. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 391516	100	BPBD
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	 ; Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ; ; ;	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk = 52. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 52	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	10.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.f.1	Sosial	 ;Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 28024. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 28024	100	DINAS SOSIAL
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota ; ; ;	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 8.638. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 8.638	100	DINAS SOSIAL

2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 168700. Jumlah Pasangan Usia Subur = 207091	81.4617728	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 18.566. Jumlah Pasangan Usia Subur = 207.091	8.9651409	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		100	DINAS PERHUBUNGAN
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		75.17	DINAS PERHUBUNGAN
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 74. Jumlah PD = 74	100	DINAS KOMINFO
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 14. Jumlah Layanan Publik = 24	58.3333333	DINAS KOMINFO
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 970097. Jumlah penduduk = 1380854	70.2534084	DINAS KOMINFO
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 1223. Jumlah seluruh koperasi aktif = 1336	91.5419162	DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN

3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota 	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 5287. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 778	679.562982	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.d	Kehutanan			100	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota 	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 1. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1	100	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 127. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 127	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk 	Realisasi = 138079.6. RDKK = 322226	42.8517873	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 4467. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 10250	43.5804878	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota 	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 352. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 17456	2.0164986	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		81.5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

